Seri Pendidikan Publik JP 86

SRHR (Sexual Reproductive Health and Rights) & Perubahan Iklim

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

PENDIDIKAN PUBLIK

JP86 SRHR dan Perubahan Iklim

Gedung Pertemuan Ilmiah Universitas Hasanuddin Makassar
Senin 14 September 2015
Jurnal Perempuan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender (P3KG) Universitas Hasanuddin

Keynote Speech:
Dr. Gadis Arivia, Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan
Dr. dr. Siti Maisuri Chalid, SpOG, Direktur Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan Rumah Sakit Pendidikan Unhas

Pembicara:
Prof. Dr. dr Veni Hadju, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
Wahidah Rustam, aktivis perempuan
Meisy Papayungan, MSc. PH., Kepala Sub Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan & Anak Badan Pemberdayaan Perempuan & KB Provinsi Sulawesi Selatan

Moderator:
Anita Dhewy, M.Si., Sekretaris Redaksi *Jurnal Perempuan*

1
PEMBUKAAN

MC (Siti Nurhasanah Furqni)

Selamat datang di Pendidikan Publik Sexual Reproductive Health and Rights dan Perubahan Iklim. Yang terhormat Rektor Universitas Hasanuddin yang dalam hal ini diwakilkan Dr. dr. Siti Maisuri Chalid, SpOg. Yang kami hormati, Dr. Gadis Arivia selaku direktur eksekutif dan pendiri *Jurnal Perempuan*, serta yang kami hormati para narasumber: Prof. Dr. dr. Veni Hadju, Wahidah Rustam, dan Meisy Papayungan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan limpahan rahmatnya serta shalawat dan taslim atas junjungan nabi besar Muhammad SAW.
Yayasan Jurnal Perempuan adalah organisasi non profit yang didirikan pada tahun 1995 dan Yayasan Jurnal Perempuan dikenal dengan penerbitan, penelitian dan pendidikan untuk memajukan kesetaraan gender di Indonesia. Yayasan Jurnal Perempuan dikenal dengan jurnalnya yang terbit pertama kali pada tahun 1996 sebagai satu-satunya jurnal feminis Indonesia dan sampai saat ini *Jurnal Perempuan* telah menerbitkan 86 edisi dengan meraih pembaca yang lebih luas seperti akademisi, anggota parlemen, aparatur pemerintah, profesional, dan kalangan umum. Sebelumnya, pendidikan publik *Jurnal Perempuan* ini terlaksana berkat kerjasama antara Yayasan Jurnal Perempuan dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender Universitas Hasanuddin. Selanjutnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender (P3KG) adalah salah satu dari dua belas pusat penelitian dan pengembangan di bawah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Hasanuddin. P3KG berdiri sejak Januari 2011 yang merupakan gabungan dari dua pusat studi di Universitas Hasanuddin yaitu Pusat Studi Kependudukan dan Pusat Studi Wanita. Selanjutnya, *opening speech* oleh Dr. Gadis Arivia selaku direktur eksekutif dan pendiri Jurnal Perempuan. Waktu dan tempat kami serahkan.

2
KEYNOTE SPEECH

"Di dalam *Jurnal Perempuan* ini kita juga melihat isu yang terkait dengan *environment for justice*" –***Gadis Arivia***

Gadis Arivia
(Direktur Eksekutif YJP)

Terima kasih. Selamat siang. Assalamu-alaikum wr. wb. dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang saya kasihi, terima kasih banyak telah mengundang kami dari *Jurnal Perempuan* untuk datang ke Makassar. Mungkin ini sudah beberapa kali ke sini tetapi setiap kali selalu ada yang berbeda dan setiap kali kemari kami pasti makan ikan bakar. Tadi siang dan kemarin siang juga kami makan itu. Rasanya buat kami, *Jurnal Perempuan*, Makassar adalah mitra yang sudah lama sekali sejak awal tahun 2000-an kami ke sini selalu disambut dengan hangat di Makassar. Kebetulan juga saya melihat ada beberapa Sahabat Jurnal Perempuan yang jauh-jauh datang kemari untuk mengikuti acara ini. Ibu-ibu dan Bapak-bapak, memang kali ini *Jurnal Perempuan* mengangkat isu-isu yang menjadi masalah di Indonesia. Jadi, *Sexual Reproductive Health and Rights* atau Hak Kesehatan Reproduksi Seksual di JP 86 merupakan isu yang banyak mendapat pertanyaan sebetulnya. Ada beberapa pertanyaan missalnya, apa hubungan kesehatan reproduksi dengan alam? Padahal selama ini dalam wacana gender mungkin kita berpikir bahwa apa yang disebut dengan isu kesehatan reproduksi adalah isu kesehatan reproduksi perempuan tanpa ada kaitannya dengan alam.

Tetapi di abad ke-21 ini ternyata isu kesehatan reproduksi juga ada kaitannya dengan alam. Jadi persoalan gender di abad ke-21 ini semakin kompleks. Kemudian isu reproduksi ini juga berkaitan dengan pembangunan. Jadi kalau di abad kedua puluh isu pembangunan tidak ada kaitannya dengan gender, hanya berkaitan dengan kemiskinan dan populasi misalnya, sekarang kita melihat isu pembangunan juga berkaitan dengan gender. Lalu apa hubungannya dengan perubahan iklim? Kita mempunyai faktor baru lagi, bukan hanya kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan pembangunan tetapi juga kesehatan reproduksi berkaitan dengan alam lalu juga kesehatan reproduksi berkaitan dengan perubahan iklim. Sesudah semua isu itu di kupas, ternyata pertanyaan yang paling akhir adalah apakah ada hubungannya dengan ketidakadilan gender atau dimanakah letak keadilan itu? Selama ini memang kalau kita berbicara tentang *environment* atau lingkungan, teman-teman yang mempelajari lingkungan merasa bahwa tidak ada hubungannya dengan gender, apalagi keadilan. Tetapi ketika studi gender sudah begitu kuat sekarang di universitas-universitas, mereka memper-lihatkan bahwa isu lingkungan juga berkaitan dengan *justice*. Jadi di dalam *Jurnal Perempuan* ini kita juga melihat isu yang terkait dengan *environment for justice*. Jadi keadilan lingkungan berhubungan juga dengan gender dan isu-isu perempuan dan sebagainya. Kita tahu bahwa sudah ada ICPD yaitu International Conference on Population and Development di tahun 1994 lalu juga ada instrumen internasional lainnya yaitu IPPF di tahun 1996 yaitu International Planned Parenthood Federation. Di tahun 1994 sudah ada 179 negara yang meratifikasi dan yang menarik dari ICPD di tahun 1994 ini adalah menyepakati bahwa kesehatan reproduksi juga merupakan persoalan *population and development*. Namun bukan hanya kesehatan reproduksi dan persoalan *population and development* saja yang mereka canangkan tetapi, yang menarik, juga persoalan seksual. Bahkan mereka juga menyertakan persoalan seksual minoritas dalam ICPD. Dan di International Planned Parenthood Federation, kita melihat juga bahwa ditambahkan lagi apa yang disebut dengan hak-hak reproduksi itu. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu melihat *Jurnal Perempuan* halaman 50, kita bisa melihat dengan detail ada 12 poin yang merupakan hak dari reproduksi yang terdapat di dalam IPPF. Misalnya, satu, hak untuk hidup. Dua, hak atas kemerdekaan dan keamanan. Tiga, hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Empat, hak-hak atas kerahasiaan pribadi, maksudnya juga termasuk pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. Lima, hak atas kebebasan berpikir. Enam, hak mendapatkan informasi dan pendidikan. Tujuh, hak untuk menikah atau tidak menikah. Delapan, hak memutuskan untuk mempunyai anak atau tidak mempunyai anak. Sembilan, hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Sepuluh, hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Sebelas, hak kebebasan untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam politik.

Dan dua belas, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Kita yang dulu mempelajari kajian gender atau kita yang dulu mempelajari kajian pembangunan dalam kebijakan publik bertanya-tanya apa hubungannya hak reproduksi dengan hak untuk hidup misalnya. Apa hubungannya hak reproduksi dengan hak untuk menikah atau tidak menikah misalnya. Tetapi ternyata IPPF dengan detail menulis tentang kedua belas poin ini sehingga kita melihat bahwa banyak hubungannya. Kalau pembangunan mau sukses maka harus juga memperhatikan semua hak-hak yang dituliskan di dalam 12 poin ini termasuk juga hak kemajuan ilmu pengetahuan. Kalau seorang ibu tidak tahu, misalnya, kanker serviks itu menjadi sebuah ancaman bagi perempuan, itu akan menjadi membahayakan bagi kesehatan dia. Kalau membahayakan kesehatan dia maka juga membahayakan keluarganya lalu juga lingkungannya. Jadi ini menurut saya kita sudah sempat maju dengan instrumen-instrumen gender ini secara internasional hanya sayangnya kita belum memahaminya atau informasi-informasi tersebut belum sampai sehingga kita melihat di dalam *Jurnal Perempuan* ke-86 ini, masih banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak reproduksi, dengan alam, dengan pembangunan, dan bahkan dengan perubahan iklim. Misalkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu membaca kasus dan cerita, memang di sini disebutkan bahwa salah satu metode dari pendekatan gender adalah cerita karena metodologi kita memang bukan positivistik. Metodologi kita adalah metodologi kualitatif dan metodologi atau epistemologi yang bertumpu pada pengalaman perempuan. Sehingga di *Jurnal Perempuan* pengalaman-pengalaman itulah yang kita hadirkan. Jadi misalnya perempuan Molo di NTT yang merawat tubuh dan alamnya yang ditulis oleh Deshinta D. Asriani dari Fisipol UGM. Seperti Yavet Banoet, Amahere dan Aleta Baun, mereka menentang penambangan batu marmer leluhur dengan cerita-ceritanya yang begitu menyentuh. Mereka tidak hanya melindungi kebanggaan leluhur, spiritualitas, masyarakat adat setempat tetapi mereka juga memperlihatkan bahwa penambangan juga berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan, pada keberadaan perempuan, sehingga Ibu Aleta Baun mendapat penghargaan internasional atas perjuangan-perjuangannya. Selain itu kita juga bisa lihat di Sumatera Selatan misalnya, di air Sugihan, bagaimana perempuan merawat air, tanah, dan keluarga. Jadi rawa-rawa, tempat yang begitu terpencil, pendekatan untuk membuat lahan adalah dengan pembakaran. Tetapi pembakaran tersebut memengaruhi kehidupan dan kesehatan mereka, dan kesehatan anak-anak mereka. Juga bagaimana di dalam cerita ini—yang juga sekaligus merupakan kajian gender ini—mereka tidak diam begitu saja mengharapkan pemerintah daerah membantu mereka dan tidak ada yang mau membantu mereka juga karena mereka hanya ibu-ibu. Tetapi mereka menunjukkan bahwa meskipun mereka adalah ibu-ibu tetapi mereka dapat melakukan sesuatu. Jadi mereka bekerja kemudian mereka menimba air dan membersihkan parit, membuat irigasi, menyaring air, menyimpannya lalu mengolah tanah tersebut menjadi produktif. Semua hanya dengan kesadaran bahwa mereka harus menjaga keluarga dan lingkungan mereka. Jadi banyak sekali, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, cerita di dalam *Jurnal Perempuan 86* ini.

“Pada akhirnya kita memang harus beraliansi, bekerjasama, karena kemajuan perempuan juga kemajuan laki-laki”

Ada juga tulisan dari Ahmad Badawi yang memperlihatkan hubungan kesehatan reproduksi dengan perubahan iklim. Ini sesuatu yang buat saya juga baru karena 2-3 tahun yang lalu saya tidak melihat kebijakan-kebijakan perubahan iklim menyentuh persoalan gender. Nah, di dalam tulisan Ahmad Badawi ini sangat jelas sekali bagaimana hubungannya dengan gender dan terutama yang menarik untuk saya adalah dia menghubungkannya dengan budaya patriarkal. Jadi kalau seandainya kebijakan-kebijakan pembangunan kita ini sudah progender, dalam arti kuantitas ya, misalnya sekian persen perempuan sudah masuk pemerintahan dan sekian persen perempuan sudah jadi bupati, ternyata tidak cukup. Bisa saja mereka, perempuannya, sudah menjadi bupati dan kepala daerah tetapi masih memiliki cara berpikir yang sangat patriarkal, yang sangat menindas perempuan, atau yang tidak tahu kebutuhan-kebutuhan perempuan. Jadi ini yang menurut saya menarik di halaman 113 dan, seperti yang tadi sudah saya katakan, hubungannya sangat kuat dengan hak-hak reproduksi. Dan kita lihat bagaimana tulisan kajian di pesantren ketika seksualitas diangkat kemudian di situlah timbul problem. Jadi kita tak bisa lari dari kajian tentang hak-hak seksualitas juga. Apalagi kita baru juga meneliti, sangat sedih sekali, bahwa RUU KKG yang diperjuangkan selama 5 tahun menjadi hambar dan tidak diloloskan di DPR. Padahal RUU KKG ini kita butuhkan supaya bisa menjadi payung untuk semua yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Oleh sebab itu kita memang baru saja berkabung tetapi, alhamdullilah, minggu lalu teman-teman dari PDIP dan partai-partai lain berkata bahwa kita harus terus berupaya untuk RUU KKG ini. Mungkin saya tidak berlama-lama tetapi memang sejarah *Jurnal Perempuan* itu sudah lama sekali. Kita sudah menginjak 19 tahun di tahun ini dan tahun depan kita akan berumur 20 tahun. Selama 20 tahun itu ada suka dukanya merawat pengetahuan perempuan. Mengumpulkan begitu banyak peneliti, penulis perempuan, yang saya ingat pada tahun 1996, saya susahnya minta ampun ketika mencari penulis-penulis dan peneliti-peneliti gender dan bahkan kata gender pada waktu itu pun banyak yang tidak tahu di perguruan tinggi. Tetapi sekarang setelah 19 tahun ini sudah ada ratusan penulis dan peneliti kajian gender yang kita libatkan di dalam *Jurnal Perempuan*. Dan bukan hanya perempuan, ini ada contohnya saya bawa ke Makassar, Pak Bonnie misalnya. Dia laki-laki tetapi sangat progender. Pada akhirnya kita memang harus beraliansi, bekerjasama, karena kemajuan perempuan juga kemajuan laki-laki. Terima kasih.

3
SAMBUTAN

"Perempuan memegang peranan hampir di semua lini jadi jika kebutuhan perempuan dipenuhi maka permasalahan di sekitarnya akan dapat teratasi" - ***Siti Maisuri Chalid***

Dr. dr. Siti Maisuri Chalid, SpOG
(Direktur Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan Rumah Sakit Pendidikan Unhas)

MC (Siti Nurhasanah Furqni)
Selanjutnya *opening speech* oleh Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, M.A., yang akan diwakilkan oleh Dr. dr. Siti Maisuri Chalid, SpOG., sekaligus pembuka acara pendidikan publik pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan.

Dr. dr. Siti Maisuri Chalid
Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati Ibu Dr. Gadis, Prof. Veny, Ibu Meisy dan laki-laki baru, dan saudara saudari, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan juga dari Jurnal Perempuan. Senang sekali bisa berkumpul di tempat ini untuk mengkaji bersama kesehatan reproduksi dan lingkungan. Saya diminta oleh rektor yang kebetulan sedang ke Jepang. Saya sebetulnya bukan dalam kapasitas wakil rektor. Saya sebetulnya adalah Direktur Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan Rumah Sakit di Universitas Hasanuddin dan saya adalah dokter spesialis ginekologi jadi memang tidak terlalu jauh dengan kesehatan reproduksi karena sehari-hari saya banyak bergelut dengan banyak masalah kesehatan reproduksi.

Tadi malam saya berbicara di TVRI membahas tentang tingginya AKI di Sulawesi Selatan. Itu juga salah satu masalah dalam kesehatan reproduksi. Saya membaca jurnal ini dan saya sangat terkesan. Terus terang saya baru membaca JP, untuk edisi ke-86 ini saya terkesan. Saya baru mendapat JP dua hari yang lalu dan di sela-sela kesibukan saya menyempatkan membaca, tadi yang dikatakan Ibu Gadis, artikel-artikel yang menarik tentang bagaimana perempuan menjadi perawat bagi alam dan keluarga. Jadi memang perempuan dengan perubahan iklim, saya juga mencoba mencari, yang begitu hebatnya sekarang berhubungan karena penduduk dunia 70 persennya adalah perempuan dan yang paling merasakan dampak dari perubahan iklim adalah perempuan. Perempuan adalah, dalam hal ini adalah ibu, guru kehidupan. Kuncinya adalah ibu atau perempuan jikalau diberikan edukasi yang baik bersamaan dengan dihormati hak-hak reproduksinya, karena ia adalah guru, maka ia akan mampu mengajarkan pada generasi berikutnya, pada lingkungannya, pada anak-anaknya mengenai hal-hal yang baik dari edukasi. Jadi kunci dari begitu banyak masalah dalam perubahan iklim, seperti misalnya membuang sampah, bagaimana kita memperlakukan hal-hal yang remeh seperti membuang plastik dan sebagainya, kalau itu dimulai dari keluarga maka alangkah bagusnya. Kalau kita merawat perempuan maka hampir semua lingkungan hidup perempuan itu terawat. Mulai dari bayi dalam kandungannya, balita, sampai kepada orang tua (karena peran tradisionalnya adalah ibu rumah tangga). Perempuan memegang peranan hampir di semua lini jadi jika kebutuhan perempuan dipenuhi maka saya rasa permasalahan-permasalahan di sekitarnya akan dapat teratasi. Saya kira itu sepatah dua patah kata dari saya mewakili ibu rektor dan saya ucapkan selamat saling mencerahkan hari ini dan mudah-mudahan kita mendapat banyak manfaat dari pembicara-pembicara, yang saya kira sudah tidak diragukan lagi, yang akan berbicara mengenai kesehatan reproduksi dan perubahan iklim itu sendiri. Dengan mengucapkan bismillahirrah-manirrahim, saya mewakili ibu rektor menyatakan Pendidikan Publik Sexual Reproductive Health and Rights dan Perubahan Iklim saya buka. Walaikumssalam wr wb.

MC (Siti Nurhasanah Furqni)

Selanjutnya sesi diskusi Pendidikan Publik *Jurnal Perempuan* dengan tema Sexual Reproductive Health and Rights dan Perubahan Iklim akan dipandu oleh moderator Ibu Anita Dhewy selaku sekretaris *Jurnal Perempuan*. Waktu dan tempat dipersilakan.

4
DISKUSI

"Hari-hari ini dan ke depan, persoalan perubahan iklim adalah isu global yang berdampak signifikan bagi perempuan" – ***Anita Dhewy***

Moderator, Anita Dhewy
(Sekretaris Redaksi Jurnal Perempuan)

Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara/Saudari, dan Kawan-kawan Mahasiswa. Terima kasih telah datang di acara Pendidikan Publik *Jurnal Perempuan* hari ini yang mengambil tema Sexual Reproductive Health and Rights dan Perubahan Iklim. Jika perguruan tinggi itu mengenal Tri Darma Perguruan Tinggi dengan tiga aspeknya: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat maka *Jurnal Perempuan* memiliki visi yang berfokus pada tiga aspek juga yaitu, penelitian, penerbitan dan pendidikan. Jadi pendidikan publik yang kita gelar pada siang hari ini adalah bagian dari visi dan misi *Jurnal Perempuan* untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. JP 86 SRHR dan Perubahan Iklim ini sudah kita siapkan jauh hari. TOR ini kita buat sekitar November 2014 karena kita sudah melihat bahwa hari-hari ini dan ke depannya, persoalan perubahan iklim adalah isu global dan seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Gadis Arivia dan Ibu Maisuri punya dampak yang signifikan bagi perempuan. Ini bisa dikatakan sebagai konsep atau terminologi baru yang membawa harapan bagi perempuan dan kelompok minoritas lainnya karena pengakuan atas hak dan kontrol kesehatan reproduksi perempuan akan menekan persoalan-persoalan krusial yang dihadapi oleh perempuan seperti AKI yang tinggi. Kita tahu sensus SDKI 2012 itu menyebutkan bahwa AKI di Indonesia mencapai angka yang tinggi yaitu 359. Selain itu juga persoalan pernikahan anak

juga menjadi persoalan krusial, begitu juga dengan persoalan HIV/AIDS. Maka ini adalah hal yang penting yang perlu kita bicarakan bersama. Dalam kaitannya dengan perubahan iklim, perubahan iklim mengakibatkan akses perempuan terhadap SRHR menjadi semakin sulit karena dengan adanya banjir di musim penghujan, kelangkaan air di musim kemarau, dan kelangkaan pangan maka persoalan yang dihadapi perempuan semakin sulit. Bersama kita siang ini telah hadir tiga pembicara yang masing-masing kompeten di bidangnya. Ada seorang akademisi, Prof. Dr. dr. Veni Hadju, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Beliau akan berbicara tentang hak kesehatan reproduksi dan pendidikan bagi perempuan. Ini memang bidang beliau karena Prof. Veni menamatkan S1 di Ilmu Kedokteran Universitas Hasanuddin lalu S2 dan S3nya di Cornell University, Amerika. Beliau seorang peneliti di bidang ilmu kesehatan ibu dan anak yang aktif menulis artikel di jurnal maupun di media massa dan juga menjadi pembicara di forum nasional maupun internasional. Lalu bersama kita siang ini juga sudah hadir seorang aktivis perempuan, Ibu Wahidah Rustam yang akan berbicara tentang perempuan dan perubahan iklim. Ibu Ida lahir di Ujungpandang, 10 April 1975. Ia benar-benar besar di gerakan, mengawali kerja di isu perempuan pada tahun 2000 di Makassar dengan bergabung dalam Forum Perempuan Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan. Lalu juga tergabung dalam Organisasi Solidaritas Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia. Pada tahun 2005 sampai tahun 2009 menjadi ketua dari Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Anging Mammiri yang banyak melakukan advokasi di Makassar. Pada tahun 2009 beliau aktif di Solidaritas Perempuan tingkat nasional. Pembicara ketiga yaitu Ibu Meisy Papayungan, Msc. PH., Kepala Sub Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan yang akan berbicara mengenai kebijakan pengarusutamaan gender dan peranannya dalam SRHR. Ibu Meisy lahir di Makassar, 21 Oktober 1969. Meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin sementara gelar Masternya didapatkan dari Griffith University, Brisbane, Australia dengan fokus studi pada kesehatan masyarakat pada tahun 2002. Sebelum menjadi kepala Sub Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Meisy memegang jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Data dan Kependudukan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pernah menjabat sebagai Seksi Kesehatan Ibu dan Anak di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau juga pernah menjabat sebagai Executive Secretary of Decentralized Health Service di Asian Development Bank. Tak perlu berpanjang lebar lagi, saya persilakan kepada Prof. Veni untuk memulai presentasinya. Sambil menunggu presentasi, seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Gadis dalam pidatonya, di JP 86 ini banyak sekali riset-riset yang dilakukan yang menarik untuk dibaca. Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sudah mendapatkan jadi kami sangat berharap bahwa nanti bisa dibaca karena banyak pengetahuan yang ada di sini yang bisa menambah pemahaman kita tentang SRHR dan bagaimana kaitannya dengan perubahan iklim. Baik, kita mulai.

DISKUSI

"Hak reproduksi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional" – ***Veny Hadju***

Prof. Dr. dr. Veny Hadju

(Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin)

Assalamualaikum wr. wb. Apa kabar semuanya? Alhamdullilah, kita bersyukur pada Allah SWT karena pada siang hari ini kita bisa datang ke acara Pendidikan Publik. Ibu Dr. Gadis Arivia yang saya hormati dan Bapak Boni, para pembicara, dan juga ada Dr. dr. Siti Maisuri Chalid, SpOG. sebagai wakil Rektor. Hari ini saya diminta untuk membawakan materi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kebetulan saja bidang kajian saya adalah gizi ibu dan anak. Meskipun begitu saya memiliki perhatian yang besar pada kualitas hidup perempuan, terutama khususnya ibu dan anak. Makalah atau materi yang akan saya sampaikan sebenarnya adalah rangkuman dari beberapa artikel atau jurnal yang ada di internet dan akan saya tambahkan sedikit dari penelitian kami. Dan kemarin itu ada penelitian kami yang mengkaji ibu-ibu hamil yang bekerja sebagai pekerja informal. Ada yang bekerja sebagai tukang cuci atau penjual di pasar. Mereka bekerja di luar rumah tetapi sifatnya informal dan umumnya mereka terpaksa bekerja karena suami mereka tidak memberikan pengha-silan yang cukup dan sebagai orang-orang yang memerhatikan kesehatan, kita sangat prihatin pada ibu-ibu hamil yang harus bekerja keras seperti itu. Kami

tanyakan, “Kalau Ibu tidak bekerja seperti apa?” Mereka katakan, “Tetapi kami kasih makan apa anak-anak kami kalau tidak bekerja? Karena suami kami tidak bisa memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya”. karena harus bekerja keras akibatnya tentu angka kelahiran menurun seperti misalnya AKI semakin tinggi dan anak-anak yang lahir pun bermasalah seperti misalnya lahir dengan berat badan yang rendah dan konsekuensi-konsekuensi yang seperti itu. Jadi memang memprihatinkan jika pemerintah kita kurang memberikan perhatian besar pada ibu-ibu hamil yang telah bekerja keras itu. Baik, dalam presentasi selama 20 menit ini, kami akan mempresentasikan tentang apa saja masalah kesehatan reproduksi yang dialami oleh bangsa ini dan juga secara global kemudian sedikit menyinggung tetang ICPD yang terkait dengan Konvensi Umum tentang Hak dan Kesehatan Reproduksi Seksual. Kemudian akan membahas secara spesifik tentang pendidikan bagi perempuan dan akan saya bagikan beberapa data tentang mengapa mendidik remaja putri yang suatu saat akan menjadi seorang ibu itu penting. Mohon maaf, kualitas gambar pada slide tidak sebagus yang diharapkan. Gambar ini memberitahu pada anda semua bahwa kesehatan reproduksi secara global sangat memprihatinkan. Kalau kita lihat pada poin pertama, dalam grafik tampak 80% penularan HIV melalui infeksi seksual. Seperti yang kita tahu, hubungan seksual merupakan salah satu transmisi HIV. Jadi kita melihat bahwa perempuan menjadi salah satu yang berisiko tinggi terkena HIV. Kemudian ternyata dari 50% dari keseluruhan penderita infeksi tersebut, 61 persennya diderita oleh perempuan-perempuan yang ada di Afrika. Ada data tentang 200 juta perempuan yang belum mengenal kontrasepsi, 80 juta perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dan ada 500 ribu perempuan yang meninggal tiap tahunnya. Dari masalah-masalah yang ada ternyata ada tiga *major concern* ketika membicarakan SRHR. Yang pertama berkaitan dengan *High Incident of Unplanned and Unwanted Pregnancies*. Ini terjadi secara global. Mungkin kalau di Indonesia ini tidak begitu tampak. Saya pernah berkunjung ke salah satu negara, kebetulan memberikan pelayanan kesehatan yang dasar. Di sana yang diurus oleh puskesmas itu utamanya adalah perempuan-perempuan yang mempunyai anak tetapi tidak ada suaminya. Itu jarang di Indonesia tetapi di negara-negara maju seperti itu kondisinya. Perempuan-perempuan yang hamil, tak jelas suaminya, tetapi mereka masih dalam usia sekolah. Inilah yang menjadi *concern* utama dan ini yang disebut dengan *teenage pregnancy*. Kemudian ada yang namanya *unplanned and unwanted pregnancies*. Ini juga penting. Orang-orang yang hamil tapi tidak direncanakan dan juga yang hamil tapi tidak diinginkan menjadi masalah yang besar. 80% aborsi yang dilakukan di Indonesia dilakukan oleh ibu-ibu yang sudah bersuami. Tetapi mereka ini hamil tanpa diinginkan. Nah, ini menjadi *concern* bagi kita-kita ini dan termasuk saya juga. Saya juga termasuk yang sering berceramah tentang agama dan *concern* mengenai fakta bahwa banyak ibu-ibu kita yang tidak menghendaki kehamilan itu lalu mencari jalan pintas dan melakukan aborsi. Padahal aborsi dalam Islam merupakan salah satu perbuatan yang haram hukumnya, sangat dilarang. Bagaimana menerima sebuah kehamilan adalah salah satu hal yang harus kita sampaikan.

"Perempuan hamil di Sulawesi Selatan masih banyak yang bekerja di sawah dan angkat barang, hal ini jauh dari perhatian pemerintah"

Lalu yang kedua sudah disampaikan oleh moderator tadi tentang kematian ibu dan anak yang sangat tinggi khususnya di Indonesia. Bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu *maternal mortal raten*ya hanya 40. Bahkan sekarang mungkin sudah turun menjadi 30. Kita sekarang masih 359 per 100.000 kelahiran. Berarti kita masih sepuluh kali lipat dari tetangga kita. Itu belum dibandingkan dengan Singapura dan negara-negara lain, kita masih sangat tinggi.

Concern yang ketiga adalah mengenai HIV/AIDS, *sexual transmisses* utama di negara kita. Kalau kita lihat prevalensi, memang untuk HIV dari tahun ke tahun meningkat. Kalau ada penurunan itu tidak terlihat dengan jelas. Jumlah kasusnya dari tahun ke tahun semakin tinggi tetapi kalau prevalensinya untuk jumlah kasus baru ada kecenderungan mulai berkurang tetapi akumulasi dari itu tentu masih tinggi. Sekarang kita beralih menjelaskan sedikit tentang hukum reproduksi. Kita mulai dengan sejarah tahun 1945, mulai terlihat ada upaya untuk memperkenalkan HAM dan pada tahun 1948 ada Universal Declaration of Human Rights. Jadi Deklarasi Hak Asasi Manusia itu dimulai pada tahun 1948. Kemudian ada Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women. Lalu juga ada ICPD, yang saya kira kita semua sudah sering mendengar ini, International Conference on Population and Development yang mencetuskan beberapa HAM yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Gadis. Ini semua memperlihatkan perjalanan panjang tentang bagaimana hak-hak asasi dan kesehatan reproduksi perempuan ini diperbincangkan atau diberi perhatian. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hubungan hak-hak asasi manusia tersebut dengan hak reproduksi? Ini yang akan kita bicarakan pada siang hari ini.

Kalau kita lihat di sini ketika ICPD muncul pada tahun 1994 barulah diakui hak-hak reproduksi yang terkait dengan beberapa aspek berikut. Hak reproduksi bersandar pada hak semua pasangan atau individu untuk memutuskan secara bebas dan secara bertanggung jawab tentang jumlah, jarak dan waktu untuk memiliki anak dan hak untuk mendapatkan informasi dan sarana untuk melakukannya. Ini salah satu aspek saja. Termasuk juga hak mereka untuk memutuskan terkait reproduksi, untuk perempuannya, dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan seperti yang dikatakan dalam dokumen HAM. Sekarang, bagaimana hak-hak reproduksi ini dihargai? Lalu bagaimana hak-hak reproduksi ini dipromosikan?

Seperti pertemuan kita pada hari ini yang mempromosikan tentang hak-hak reproduksi perempuan. Lalu bagaimana hak-hak reproduksi ini di-*protect* atau dipenuhi? Untuk itu tentu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Dalam mempromosikan hak-hak asasi bagi perempuan ini tentu kita harus mempersiapkan suatu *equal access* agar mereka dapat menikmati hak-hak asasi mereka ini termasuk edukasi, mendapatkan hunian yang layak, kesempatan kerja yang

sama, dan juga layanan kesehatan serta keamanan. Ini semua adalah hak-hak yang bukan saja bermanfaat bagi perempuan tetapi juga memberikan mereka proteksi atau kemampuan untuk memproteksi diri mereka. Kalau saya membaca lebih jauh ini dapat menjamin bagaimana perempuan itu dihormati, misalnya ketika mereka pergi ke pelayanan kesehatan tak akan lagi ditanya "Mana izin dari suami?". Jadi mereka diberikan kesempatan untuk mencari layanan kesehatan sehingga mereka mendapatkan perlindungan dari penyakit-penyakit. Memberikan perlindungan ini bisa lewat memberikan informasi yang baik dan benar. Kebetulan kami memiliki jurusan kesehatan reproduksi, saya meminta mereka datang tetapi sayang sepertinya waktunya kurang pas.

Ada juga S2 studi *Health Promotion* atau Promosi Kesehatan. Ini penting, bagaimana mempromosikan hak-hak reproduksi perempuan dengan baik, benar, lengkap dan terbuka. Semoga ini bisa disebarluaskan ya. Lalu yang kedua tentang bagaimana memberikan pelayanan yang terjangkau di masyarakat. Memberikan pelayanan-pelayanan reproduksi yang tersistem, memberikan pelayanan yang memadai tanpa diskriminasi, menyediakan *hotline service*, memberikan rumah aman bagi korban kekerasan. Ini contoh-contoh saja perlindungan yang bisa dilakukan pada perempuan. Saya dengan Ibu Rabina akan membawa kasus-kasus yang kita liput kemarin tentang perempuan-perempuan yang sedang hamil besar dan berjualan di pasar itu dan mengajak mereka sebagai bahan-bahan advokasi buat pemerintah. Mereka ini termasuk orang-orang yang berisiko mengalami kematian ibu. Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang tidak memberikan perhatian besar kepada ibu hamil. Itu salah satu hasil dari penelitian teman. Ibu hamil yang ditemui bekerja di jalan dan di pasar dianggap biasa saja. Berbeda dengan di provinsi lain, ketika melihat ibu hamil maka mereka sangat dihargai, dibantu dan dihindarkan dari pekerjaan-pekerjaan berat.

Kalau di Sulsel tidak. Banyak ibu-ibu yang tengah hamil masih membantu suaminya di sawah dan berjualan dan mengangkut barang berat di pasar. Inilah yang memunculkan risiko-risiko yang sangat memprihatinkan di Sulsel. Inilah yang masih jauh dari pantauan para pembuat kebijakan. Untuk kebijakan sendiri, memang kita sudah memiliki beberapa aspek tetapi masih kurang. Secara umum, kalau kita baca di Departemen Kesehatan pasti mereka akan bilang seperti ini: *Improving Equality, Accessibility, Availability, Affordability of Primary Health Care Services*. Seperti itu. Perempuan tentu disebut tetapi tidak secara spesifik tetapi sudah ada niat baik untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi perempuan.

Tetapi ini masih perlu dirinci lebih detail supaya kita bisa tahu bagaimana dan sejauh mana kebijakan ini sudah menyentuh mereka, termasuk ibu-ibu miskin yang berisiko. Kalau ibu-ibu yang kaya akan datang pada dokter spesialis atau ke rumah sakit-rumah sakit swasta. Lalu kebijakan kedua, yang sudah ada, adalah *Promoting Responsible and Healthy Reproductive and Sexual Behaviour among Adolescent and Youth*. Ini sudah ada juga kebijakan seperti ini. Itulah yang terkait dengan kebijakan hak-hak reproduksi. Nah sekarang tentang bagaimana edukasi hak-hak reproduksi yang sudah dilaksanakan. Program efektif dalam edukasi reproduksi dan seksual adalah bertujuan untuk menurunkan *misinform-*

mation dan memberikan informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Ini tujuannya. Untuk klarifikasi nilai dan mempertegas sikap positif dan memperkuat program, keputusan, dan *skill* dalam berkomunikasi. Ini adalah beberapa hal yang sudah dilakukan terkait dengan edukasi hak reproduksi dan seksual. Ada sebuah evaluasi yang memperlihatkan bahwa edukasi kesehatan reproduksi dan seksual tidaklah diarahkan untuk meningkatkan aktivitas seksual. Ini juga adalah salah satu hasil penelitian yang menjadi informasi buat edukasi kesehatan reproduksi dan seksual. Tentu tantang-annya tidak sedikit apalagi beberapa negara sudah memasukkan edukasi kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum bahkan SD, tetapi tentu informasi yang diberikan sesuai dengan tingkat pendidi-kannya. Belum banyak saya kira yang sudah dapat menerima yang seperti ini. Keterbatasan menjangkau remaja di luar lingkungan sekolah dan kelompok-kelompok yang termarginalkan itu penting karena hanya 60% dari kaum ibu yang bisa melanjutkan ke SMP. Berarti ada 40% dari jumlah ibu-ibu yang tidak bisa lanjut ke SMP. Jika kespro ini hanya ada di SMP atau SMA tentu jangkauan perempuan-perempuan yang tidak dapat mengakses pengetahuan ini sangat besar. Jadi banyak remaja yang seharusnya mendapatkan edukasi tetapi tidak ter-*cover* dalam berbagai macam program pendidikan. Ini masih menjadi kendala yang besar.

Kalau kita bicara tentang pentingnya tentu kita semua setuju bahwa pendidikan itu penting. Tidak boleh kita membedakan pendidikan antara laki-laki dan perempuan.
Di Indonesia, alhamdullilah, kita sudah seperti itu. Ada teman saya yang berasal dari India, kalau di India jelas-jelas di kelompok marginal, perempuan itu tidak mendapat akses dan seterusnya. Penting-nya perempuan mendapatkan pendidikan tentu, seperti sudah diangkat oleh Dr. Maisuri tentang peran strategisnya dalam keluarga, menjadi agen perubahan di rumah tangga dan masyarakat.

Kalau ketimpangan gender dalam pendidikan ini masih terus-menerus terlihat maka ini juga akan, beberapa aspek yang sering dibicarakan dalam bidang gender seperti stigmatisasi, subordinasi, dan marginalisasi, terus ada dan membuat kerentanan hidup. Tentu kerentanan hidup dari seorang perempuan akan memperparah kesehatannya, ekonominya, psikis, fisik, dan seksual. Oke, saya tutup saja. Cantik tidak seperti ini? (menunjuk gambar di slide) Seandainya ada di antara anda punya anak yang seperti ada di sini. Ini menunjukkan bagaimana kita menunjukkan perhatian pada perempuan, menyekolahkan mereka, dan mendidik mereka menjadi seorang perempuan yang tentu bukan saja mempunyai pengetahuan yang mumpuni tetapi juga mempunyai pengetahuan agama yang cukup. Dalam agama apapun tentu pendidikan bagi seorang perempuan sangat penting dan ini yang akan membuat mereka menjadi seseorang yang kokoh dalam hidup rumah tangganya.

Tidak sedikit kita melihat sekarang ini banyak rumah tangga yang hancur dan bercerai bukan karena konflik perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi tetapi justru karena perempuan mendapatkan pendidikan yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat menerima satu sama lain.

Ini yang perlu juga menjadi pemahaman kita, bagaimana agama juga menjadi salah satu aspek yang harus diajarkan kepada perempuan dan penting juga bagi laki-laki. Tentu semua agama mengajarkan pada kita tentang pentingnya doa dan ibadah. Saya hanya ingin menyatakan pada anda semua tentang hasil penelitian yang ternyata orang-orang yang bahagia dalam hidupnya maka sel-sel darahnya akan padat dan bersih. Ini juga terjadi ketika orang itu sedang berdoa. Tadi saya lihat ada salah satu buku, Perempuan dan Spiritualitas, yang penting ya. Aktivitas religius akan menghindarkan siapa saja dari stres, depresi, dan mengurangi tekanan emosi. Saya kembali pada yang tadi itu. Sekarang ini di desa-desa, mungkin Dr. Maisuri lebih paham, banyak ibu-ibu yang datang ke dokter-dokter untuk menggugurkan kandungannya dan karena mereka tidak menginginkan kehamilannya. Padahal mungkin saja kehamilan mereka memberikan berkah tetapi tentu terlepas dari adanya kekerasan. Tetapi kalau itu terjadi karena ketidaksengajaan itu harusnya diterima dengan baik. Sekiranya itu saja dari kami. Ini slide terakhir. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum wr. wb.

Anita Dhewy (Moderator)

Oke, kita sudah mendengarkan paparan dari Prof. Veny tentang SRHR dalam kaitannya dengan pendidikan. Kita akan beralih pada Ibu Wahidah yang akan berbicara tentang apa itu perubahan iklim, apa saja kebijakan pemerintah terkait perubahan iklim, dan bagaimana kemudian dampaknya bagi perempuan. Silakan.

DISKUSI

"Perempuan adalah korban terbesar dari berbagai bencana yang terjadi" –***Wahidah Rustam***

Wahidah Rustam
(Aktivis perempuan)

Terima kasih. Selamat siang. Assalamu-alaikum wr.wb. Saya mohon izin untuk berdiri biar saya bisa melihat semua Ibu dan Bapak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada *Jurnal Perempuan*, Mbak Gadis, Mbak Deedee yang sudah menghubungi saya untuk bisa berbagi pengalaman tentang bagaimana sih sesungguhnya dampak perubahan iklim terhadap perempuan. Dalam hal ini soal seksualitas, dalam soal kesehatan reproduksi dan apa hubungan antara perubahan iklim dan juga perempuan. Apakah perempuan harus tetap pasrah menerima adanya perubahan iklim? Pasrah dengan situasi dia yang, seperti Prof. Veny tadi sampaikan, subordinat, termarginalkan, mengalami kekerasan, mengalami beban ganda, dan sebagainya. Mudah-mudahan presentasi ini bisa memberikan sedikit gambaran dan saya berharap kita bisa mendiskusikan lebih banyak tentang isu ini karena, seperti apa tadi yang dikatakan oleh Mbak Gadis, memang persoalan hak reproduksi dengan situasi saat ini yaitu iklim yang terus-menerus berubah sangat berdampak pada kehidupan perempuan. Mungkin kapasitas saya berada di sini sebagai aktivis perempuan jadi saya memang akan lebih banyak bercerita tentang bagaimana situasi, bagaimana pengalaman perempuan dalam menghadapi perubahan iklim.

Ini adalah alur presentasi yang akan saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Yang pertama soal perubahan iklim, kemudian bangkit dari persoalan perubahan iklim, memahami tentang perubahan iklim, kemudian kita melihat dampak perubahan iklim pada perempuan, dan selanjutnya kita akan melihat secara lebih spesifik dari dampak tadi terhadap situasi perempuan lalu bagaimana pengalaman-pengalaman perempuan petani, perempuan nelayan yang semakin mengalami situasi yang sangat termarginalkan dengan perubahan iklim dan juga bagaimana inisiatif-inisiatif yang semestinya dilakukan oleh perempuan. Oke, lanjut. Ini adalah tentang perubahan iklim. Kalau kita mendengar perubahan iklim, dalam bayangan kita apa? Panas. Begitu ya. Kita semakin susah untuk menghitung pola seperti nenek moyang kita dulu menghitung: dari bulan Januari sampai bulan Juni itu adalah musim kemarau sementara dari Juli sampai Desember adalah musim hujan. Sehingga petani atau nelayan yang ingin melaut bisa menyiapkan apa yang harus dilakukan atau dikerjakan dalam iklim tersebut. Tetapi situasi saat ini, dalam perubahan iklim, kita semakin susah untuk memprediksi kapan musim kemarau dan kapan musim hujan. Semuanya jadi ekstrim. Kalau kemarau benar-benar sampai seperti masuk ke tulang-tulang panasnya. Saya baru datang di Makassar dua hari yang lalu dan ternyata panasnya memang sangat luar biasa. Kemudian juga ketika terjadi bencana alam kita melihat situasi banjir dimana-mana dan sebagainya itu semakin meningkat. Saat kita melihat perubahan iklim maka ini adalah gambaran ringkas soal bagaimana dan kenapa perubahan iklim itu terjadi. Ini tidak terlepas dari Revolusi Industri tahun 1900-an dan meningkatnya berbagai aktvitas. Bagaimana industri, tambang, bahan bakar fosil, batu bara, gas alam dan sebagainya itu kemudian semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan negara-negara industri. Inilah penyebab paling utama sehingga terjadi perubahan iklim. Yang berikutnya soal Revolusi Industri dan semakin meningkatnya aktivitas manusia maka akan meningkatkan karbondioksida yang dihasilkan dari pembakaran fosil, batu bara, minyak bumi, dan gas. Termasuk juga penebangan hutan. Kalau kita lihat bagaimana hutan Indonesia saat ini. Kita lihat asap kabut di Riau, asap kabut di Jambi, ini sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Kemudian juga dengan meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer akan mengakibatkan kenaikan temperatur bumi yang pada akhirnya juga akan meningkatkan suhu iklim di bumi sehingga yang terjadi seperti saat ini. Atmosfer sudah tidak bisa lagi menampung CO2 yang ada sehingga akhirnya mengakibatkan rusaknya ozon sehingga kita semakin susah untuk memprediksi lagi iklim karena sudah terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Oke, kita lihat per Januari-Mei 2015 setidaknya ada 881 kasus bencana alam. Ini bukan main. Dalam rentang waktu 5 bulan bencana alam ada 881. Artinya memang persoalan lingkungan, persoalan sumber daya alam, persoalan perubahan iklim ini sangat berdampak pada lingkungan dan juga berdampak pada mobilitas dan kerja-kerja perempuan. Bagaimana kekerasan terus meningkat, persoalan pendidikan perempuan yang semakin menurun, lalu persoalan kesehatan reproduksi dan sebagainya. Perubahan iklim ini kemudian menjadi perhatian seluruh dunia. Bagaimana seluruh dunia kemudian melihat bahwa dengan situasi iklim saat ini membuat kita tidak lagi bisa melakukan kerja dan memprediksi cuaca. Akhirnya para petinggi negara melalui KTT Bumi di Rio de

Janeiro, Brazil, tahun 1992 itu mendiskusikan soal apa penyebab, apa solusi, apa yang harus dilakukan sehingga perubahan iklim ini dapat diatasi oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Tetapi ada situasi yang berbeda kalau kemudian beban itu diberikan kepada negara berkembang tetapi negara industri tidak menghilangkan gaya hidupnya, pola konsumsi yang tak berkurang dan berubah, maka tetap saja negara ketiga seperti Indonesia yang masih punya hutan yang luas hanya menjadi gudang, untuk bagaimana bisa membatasi ruang-ruang masyarakat misalnya akses perempuan ke hutan karena hutan yang bisa meresap CO2 tersebut kemudian itulah yang akhirnya dibebankan pada negara berkembang. Tetapi gaya, pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat di negara industri itu tidak berubah sama sekali jadi sama saja kita masih menjadi pekerja, menjadi "ladang" bagi negara-negara industri untuk mencegah perubahan iklim. Dari KTT Bumi ini kemudian ada Kyoto Protocol pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1997 di Jepang lahirlah sebuah kesepakatan bersama yang secara khusus untuk bagaimana menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri dunia. Salah satu prinsip yang disepakati adalah menjadi tanggung jawab bersama yang dibedakan. Jadi ada yang memberi dana dan ada yang menerima dana. Tetapi kemudian ada ketidakadilan dalam posisi ini. Yang memberi dana iklim itu tidak berubah gaya dan pola hidup serta konsumsinya tetapi kemudian yang menerima dana tersebut harus melakukan berbagai persyaratan seperti menghambat akses masyarakat, khususnya masyarakat adat, ke dalam hutannya. Jadi, ada pembatasan-pembatasan yang akhirnya kita bisa melihat bahwa memang *gap* antara negara maju dengan negara berkembang itu sangat jauh. Jadi apakah dana tersebut adalah dana hibah atau dana hutang, yang jelas dana itu datang ke Indonesia salah satunya. Nah, salah satu kesepakatan dalam protokol ini juga adalah negara-negara industri menurunkan tingkat emisi 5% di bawah tingkat emisi tahun 1999 dalam periode 1999 sampai tahun 2012. Kemudian kesepakatan ini melalui ada kesepakatan untuk implementasi bersama, ada perdagangan emisi, dan kemudian ada mekanisme pembangunan bersih. Kita selalu berpikir bahwa ada uang maka bisa melakukan banyak hal tetapi kita lupa bahwa uang tersebut kemudian tidak dapat diakses oleh masyarakat khususnya perempuan karena perempuan, oleh karena peran gendernya, tidak memiliki akses ataupun mengontrol kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang dibuat oleh pemerintah. Seberapa banyak misalnya—tidak usahlah kita bicarakan musrenbang—jumlah perempuan yang hadir saat rapat RT? Berapa banyak perempuan yang terlibat dalam musrenbang? Ada kebijakan harus 30% tetapi kemudian 30% perempuan yang terlibat dalam rapat pengambilan keputusan tersebut apakah bisa menyuarakan situasi dia, pengalaman dia tentang kaitannya dengan betapa susahnya perempuan saat air bersih itu sulit, betapa susahnya perempuan ketika pangan itu mahal, betapa susahnya perempuan ketika tidak bisa mengakses (khususnya perempuan adat) hutan adat untuk mendapatkan obat-obatan herbal untuk keluarganya karena dengan adanya hutan tersebut ia tidak harus mengeluarkan uang tetapi dengan adanya kebijakan ini ia harus mengeluarkan uang untuk membeli kebutuhan pangan dan obat-obatan untuk keluarganya. Jadi kita melihatnya secara menyeluruh bahwa di balik kepentingan-

kepentingan itu kita juga harus melihat seberapa besar peluang tersebut kemudian bisa menaikkan taraf hidup perempuan, bisa menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan (apakah itu kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, dan lain sebagainya) atau seberapa besar dengan adanya dana tersebut mengurangi tingkat migrasi perempuan untuk bekerja ke luar negeri. Ini yang kemudian harus juga kita lihat. Sayangnya memang dalam persoalan ini perempuan selalu menjadi subordinat, selalu dinomorduakan, karena selalu dianggap perempuan itu sudah diwakili oleh suaminya, tetangganya, atau keluarganya yang hadir pada rapat-rapat. Padahal pengalaman menstruasi, pengalaman melahirkan, pengalaman menyusui, AKI yang semakin tinggi, gizi buruk, perempuan yang paling banyak mengalami situasi itu. Perempuan yang paling banyak mengalami marginalisasi, diskriminasi, termasuk kebijakan-kebijakan tadi yang dinyatakan oleh Mbak Gadis tentang aktivis perempuan di seluruh dunia sangat kecewa ketika kemudian RUU KKG ditolak dan tidak dimasukkan ke dalam prolegnas untuk dibahas padahal ada harapan yang besar agar RUU KKG ini menjadi payung hukum sehingga kebijakan-kebijakan diskriminatif atau perlakuan-perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok-kelompok minoritas termasuk disabilitas dan sebagainya tidak mengalami lagi ketidakadilan gender. Kalau kita lihat di sini Indonesia adalah salah satu pengemisi besar setelah Amerika Serikat. Kenapa? Yang pertama adalah hutan kita habis digundulin untuk kebutuhan negara-negara industri. Untuk pemenuhan kebutuhan kayu, untuk pemenuhan kebutuhan kertas, untuk pemenuhan macam-macam. Yang berikutnya adalah bagaimana kemudian tambang batu bara di Kalimantan dan eksploitasi sumber daya alam sangat besar-besaran sekarang apalagi dengan adanya desentralisasi. Otonomi kepala daerah untuk melakukan kesepakatan dengan pihak penanam modal atau investor itu sangat besar sehingga terjadi jual hutan untuk tambang batu bara dan sebagainya. Pengalaman saya, karena saya lama bekerja di Solidaritas Perempuan, melakukan penguatan perempuan adat di Kalimantan Tengah. Bagaimana perempuan itu—sedih sekali melihatnya—jam empat subuh harus meninggalkan rumahnya, pergi ke hutan untuk menanam pohon, dan ketika ditanya "Ibu tahu tidak menanam pohon itu untuk apa?" Jawabannya "Yang kami tahu katanya untuk bisa membantu manusia lain agar bisa bertahan." Dia lupa dengan hidupnya sendiri, dia lupa hidup anak-anaknya. Ketika dia pergi untuk menanam pohon, awalnya dana sebenarnya untuk menanam pohon itu adalah Rp 17.500,00 per pohon tetapi kemudian yang sampai ke tangan ibu-ibu itu adalah Rp 2.500,00. Dari pagi sampai sore ia menanam itu lalu kemudian ia meninggalkan anaknya tanpa makanan. Anak yang berusia delapan tahun harus pergi masuk ke hutan untuk mencari pakis untuk bisa memasak. Sedih sekali melihat itu. Dengan eksploitasi besar-besaran di Kalimantan, dengan eksploitasi di Papua misalnya, apakah taraf tingkat kehidupan masyarakat khususnya perempuan meningkat? Apakah pendidikan meningkat juga bagi perempuan? Apakah kesehatan mereka juga meningkat? Justru daerah yang dieksploitasi, yang sumber daya alamnya begitu besar, tingkat taraf hidup masyarakatnya begitu rendah. Persoalan kekerasan pun semakin meningkat di wilayah-wilayah yang banyak perusahaan tambang. Penggundulan hutan dari tahun 2000 sampai sekarang ini semakin besar. Kemudian juga karena kita sudah

meratifikasi maka mau tak mau kita harus memasukkannya ke dalam kebijakan nasional kita lalu kemudian itu berlaku secara nasional. Pertanyaannya adalah kalau representasi pemerintah adalah sebagai pembawa suara rakyat, perempuan dan masyarakat yang tidak mempunyai akses dan tak bisa melakukan kontrol terhadap situasi-situasi pengambilan keputusan lalu apakah keputusan yang diambil pada tingkat tinggi di seluruh dunia itu berbasis pada pengalaman masyarakat? Apakah berbasis pada pengalaman perempuan? Jarang disebutkan pengalaman perempuan. Selalu dianggap kita sudah cukup baik. Dampak perubahan iklim terhadap kehidupan perempuan. Kalau kita berbicara dampak, kita dari awal sudah membicarakan bahwa bencana alam semakin meningkat. Delapan ratus delapan puluh satu bencana alam di Indonesia itu hampir terjadi dalam rentang waktu lima bulan itu luar biasa. Tetapi bencana alam yang terjadi memiliki keterkaitan yang erat dengan situasi ekonomi perempuan. Ketika bencana alam itu terjadi, perempuan petani, perempuan nelayan, hilang semua tanamannya terbawa banjir, dia akan kehilangan sumber ekonominya. Perempuan yang kalau kita di sini, di Makassar kan ada petani perempuan dulu yang di sepanjang sungai Jeneberang, ketika air sungainya naik lalu kemudian banjir dan membawa tanaman pangan mereka, padi ataupun sayuran, itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi perubahan iklim ini sangat berpengaruh pada persoalan sosial ekonomi perempuan. Angka harapan hidup perempuan dan peningkatan gender *gap* dalam masyarakat. Kenapa angka harapan hidup perempuan itu semakin menurun? Karena itu tadi, perempuan tidak dibiasakan untuk bisa menolong dirinya. Ia dibiasakan untuk bagaimana memikirkan orang lain tetapi perempuan tidak pernah diajarkan untuk memikirkan dirinya dan kebutuhannya. Contohnya saja misalnya kalau ibu-ibu dan kawan-kawan semua dalam satu bulan ada uang Rp 100.000,00 misalnya. Uang itu diperuntukkan untuk apa? Pasti soal sekolah anak, membeli makanan, beli baju, untuk cicil ini dan itu. Pernah tidak memikirkan bahwa dalam satu bulan saya pasti menstruasi, harus pergi ke lokasi khusus untuk membeli pembalut. Tetapi kan kita selalu menganggap itu biasa: paling berapa pembalut? hanya sedikit yang dibutuhkan. Tetapi itu menunjukkan bahwa kita tidak perhatian pada alat reproduksi kita. Kita selalu memikirkan untuk menaruhnya pada urutan kesekian padahal itulah kebutuhan utama kita. Itulah juga yang kemudian membuat kita selalu berada dalam posisi subordinat. Setiap terjadi bencana pasti yang menjadi korban pada saat itu adalah perempuan. Kenapa perempuan? Karena itu tadi. Ia tidak diberikan kapasitas yang memadai ketika bencana datang. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) juga sudah melakukan upaya tersebut tetapi perempuan hamil, perempuan lansia, perempuan disabilitas masih kurang diperhatikan sehingga perempuan yang banyak menjadi korban. Banyak perempuan yang tidak diajarkan berenang misalnya. Katanya, untuk apa perempuan berenang? Berenang itu hanya untuk anak laki-laki. Tetapi kemudian terjadi banjir, yang laki-laki berenang sementara yang perempuan tenggelam. Karena memang mereka tidak dibiasakan untuk mempunyai *skill*, untuk mempunyai kapasitas untuk menolong dirinya sendiri. Selalu berharap kepada orang lain. Siapa orang lain itu? Apakah itu suaminya, apakah itu anak laki-lakinya, atau apakah itu saudara laki-lakinya? Eksistensinya selalu terlekatkan pada orang

di luar diri mereka sementara orang di luar diri mereka tersebut belum tentu memiliki pemahaman yang sama dengan diri mereka sebagai perempuan. Dampak berikutnya selain bencana, pemenuhan kebutuhan air bersih dan juga persoalan pangan. Pasti ketika perubahan iklim, sekarang kekeringan dimana-mana, di daerah tempat tinggal saya orang-orang mengebor dimana-mana. Ada yang membeli air dalam kemasan galon tetapi ternyata air itu bukan air bersih. Air itu diambil dari penampungan-penampungan di empang-empang lalu setelahnya dijual. Jadi sangat susah, perubahan iklim membuat sumber daya semakin sulit kita dapatkan. Perempuan juga harus bekerja dua kali lipat lebih keras, beban ganda. Kalau dulunya ia bisa mendapatkan air melalui sumur yang ada di rumahnya, kemudian kurang dan ada, misalnya, di sumur di kampung seberang, ia harus mengambil ke sana. Kenapa perempuan yang diberikan tanggung jawab itu? Karena peran gender dia. Karena air itu banyak digunakan untuk kebutuhan perempuan domestik. Jadi tanggung jawab itu masih dianggap sebagai tanggung jawab perempuan untuk memenuhi kebutuhan air, memenuhi kebutuhan pengelolaan pangan anak dan keluarga dia. Berikutnya, kesulitan bahan pangan. Beras semakin mahal, akan diimpor lagi, itu pun beras plastik. Kita selalu menjadi korban dan tidak menyadari potensi kita. Kita selalu bangga dengan Indonesia yang kaya akan sumber alamnya. Kita selalu bangga dengan Indonesia sebagai penghasil pangan dunia yang terbesar. Itu dulu, sekarang tidak lagi karena hak-hak kepemilikan masyarakat khususnya hak perempuan akan tanah semakin berkurang. Dimiliki oleh siapa? Yang punya uang. Siapa yang punya uang? Apakah orang Indonesia? Bukan, dari orang luar.

Ini adalah hak pengakuan atas tanah. Sekarang kalau tanah pertanian, siapa yang memiliki, siapa yang namanya digunakan sebagai nama pemilik sawah? Apakah atas nama ibu? Kalaupun ada hanya nol koma sekian persen perempuan yang menjadi pemilik tanah. Kalaupun ia menjadi pemilik tanah apakah ia memiliki kontrol yang besar atas pengelolaan tanah tersebut? Apakah ia memiliki kontrol atas tanaman yang ingin dia tanam di situ? Bukan dia juga. Jadi memang hak perempuan itu akan semakin berkurang, termasuk soal hutan. Misalkan ada Ibu Aleta dari NTT dan ibu-ibu di Sulawesi Tengah yang menentang pertambangan di gunung mereka. Misalnya ibu-ibu Sulawesi Tengah yang mempertahankan supaya gunung tidak dijadikan pertambangan karena di situ ada hutan adat yang sakral bagi masyarakat adat di situ. Perempuan itu adalah perawat, pengelola, dan penjaga alam. Kalau alam dicabut dari kehidupan mereka maka sama artinya dengan mematikan perempuan. Perempuan adalah yang menciptakan generasi baru karena ia memiliki rahim yang bisa melahirkan anak-anak bangsa. Kalau perempuannya mati, mengalami banyak kekerasan, mengalami angka kematian yang tinggi maka tidak mungkin kita mendapatkan generasi berikutnya yang berkualitas. Kita lanjut, semakin berkurang sumber pangan dan obat-obatan herbal dari kita karena akses yang sulit tadi. Kalau di Sulawesi Tengah, di Lore Lindu, perempuan di sana selalu mengatakan bahwa dulu penghasilan mereka berasal dari mengambil pandan dari hutan untuk dibuat menjadi tikar. Itulah sumber ekonomi perempuan di situ. Kemudian mengambil obat-obatan dan juga sayur-sayuran. Itulah sumber pangan dan apotek hidup bagi masyarakat di situ.

Ketika itu menjadi daerah percontohan untuk iklim, mereka tak bisa lagi mengakses hutan mereka. Mereka merasa dikriminalisasi ketika mereka akan masuk hutan karena mereka tidak mengetahui adanya proyek tersebut. Kalau kita melihat persoalan ini, wajar ketika masyarakat adat kita bisa saja akan hilang. Karena mereka semakin dicabut secara paksa dari sumber penghidupan mereka. Kekerasan terhadap perempuan, kita tadi sudah mendiskusikan bahwa KDRT, kekerasan seksual, tingkat perceraian yang tinggi bisa memaksa perempuan untuk bekerja sebagai buruh migran atau menjadi korban *trafficking*. Menjadi korban *trafficking* membuat mereka rentan tertular penyakit HIV/AIDS. Ini termasuk masalah kesehatan dimana penyakit-penyakit menular semakin marak seperti malaria, HIV/AIDS, dan sebagainya. Ini adalah beberapa situasi perempuan. Saya banyak menuliskan gambaran mengenai perempuan nelayan karena saya lebih banyak bekerja dengan perempuan nelayan di Cilincing, Jakarta Utara. Bagaimana kemudian kesulitan mereka ketika perubahan iklim itu terjadi, sumber ekonomi mereka semakin kurang, mereka tidak melaut lagi dan karena itu mereka tidak bisa membuat ikan kering dan sebagainya.

Ini adalah beberapa tutur perempuan. Saya ambil Ibu Meri di Lombok Barat, Ibu Meri mengatakan "Akhir-akhir ini kami sering mengalami curah hujan yang sulit diperkirakan, banjir, dan kekeringan. Akibatnya sering gagal panen. Banyak perempuan di daerah kami akhirnya bekerja tambahan dengan mencari kayu di gunung. Tetapi penghasilannya tidak cukup. Akhirnya perempuan banyak yang memilih untuk bermigrasi dan menjadi buruh migran." NTB merupakan salah satu kantong buruh migran perempuan. Jadi ini adalah beberapa situasi ketika perubahan iklim terjadi. Yang tadinya nelayan dan petani kemudian harus beralih profesi menjadi buruh migran. Saya pikir itu dan nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi-diskusi. Tetapi setidaknya direkomendasi dalam presentasi saya ini riset-riset aksi dengan mengangkat situasi-situasi perempuan sebagai pembelajaran bersama itu penting untuk dilakukan. *Jurnal Perempuan* sudah melakukan itu dengan beberapa tulisan dan saya kira mendokumentasikan pengetahuan perempuan bukanlah pekerjaan yang mudah tetapi ketika dilakukan akan memberikan *impact* yang besar bagi kemajuan perempuan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum wr.wb.

Anita Dhewy (Moderator)

Pembahasan yang sangat menarik ya, kawan-kawan. Kita akan berlanjut ke pembicara ketiga dengan Ibu Meisy. Tahun 2000 itu keluar Inpres nomor 9 tentang Pengarusutamaan Gender lalu bagaimana kemudian kebijakan pengarusutamaan gender ini dalam konteks SRHR. Ibu Meisy akan memaparkannya. Silakan.

DISKUSI

"Pemerintah kabupaten/kota perlu mengintegrasikan gender dalam kebijakan." –***Meisy Papayungan***

Meisy Papayungan

(Kepala Sub Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan & Anak Badan Pemberdayaan Perempuan & KB Provinsi Sulawesi Selatan.)

Baik, terima kasih, moderator. Assalamu-alaikum wr.wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pertama-tama saya sampaikan kepada *Jurnal Perempuan* yang sudah mengundang kami untuk turut berbicara membahas tentang bagaimana kebijakan pengarus-utamaan gender dan peranannya dalam Sexual Reproductive Health and Rights. Dan mungkin saya nantinya juga akan mencoba menggambarkan progres yang kita lakukan. Jadi isu-isu ini mengenai kesetaraan gender, hak asasi manusia, perubahan iklim, dinamika populasi, konflik bencana alam, termasuk ketahanan pangan dan fisik, akses pada sumber daya alam adalah agenda-agenda yang dibahas dalam ICPD tahun 1994. Tambahan pada itu kemudian disadari bahwa akses universal pada kesehatan dan hak reproduksi kemudian menjadi bagian yang penting dalam pembangunan nasional negara kita. Kemudian termasuk ke dalam indikator MDGs (Millenium Development Goals). Dalam MDGs, 2015 kemarin kita evaluasi, Indonesia masih belum mencapai target namun kelihatannya terlihat gambaran yang lebih baik mengenai AKI di Sulawesi Selatan yang sedikit di bawah Indonesia.

Tadi sedikit tergelitik dengan pernyataan Prof. Veny, mungkin itu juga menjadi autokritik buat kita, statemen bahwa provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi yang tidak memberikan perhatian pada ibu hamil. Ini sebetulnya kalau teman-teman dari kesehatan hadir, itu adalah kritik bagi kita untuk memicu kita untuk memberikan perhatian khusus bagi, itu baru membicarakan kesehatan ibu hamil dan melahirkan saja, belum membicarakan secara luas mengenai kesehatan dan hak reproduksi. Bagaimana kondisi saat ini? Poin pertama mengenai perubahan iklim dan dampaknya tadi sudah dijelaskan secara mendetail sekali oleh kedua pembicara sebelumnya. Ibu Wahidah bahkan sudah menjelaskan bagaimana pengaruhnya pada akses pada pangan dan terhadap berbagai faktor dalam kehidupan sehari-hari yang kalau dirunut-runut terlihat beban yang ditanggung oleh perempuan sebenarnya lebih berat. Di sini, perubahan iklim dan lingkungan memicu, misalnya, banjir di musim hujan dan kelangkaan air di musim kemarau. Tadi sudah dijelaskan. Kelangkaan pangan dan, sekarang ini, prevalensi kanker sudah semakin tinggi. Ini salah satunya. Terpicu oleh pola konsumsi dan makanan yang berubah. Ini juga tentu terpengaruh dari ketersediaan pangan yang ada. Jadi benar seperti yang Ibu Gadis bilang tadi bahwa kadang-kadang kalau kita bicara terkait gender, perempuan dan laki-laki misalnya, terhadap dampak-dampak dari pembangunan dan akses-akses sering sekali banyak yang tidak mengerti apa hubungannya. Nah, semua hal tersebut memperparah kondisi, akses, serta hak dari reproduksi. Saya ingin membagi satu pengalaman tentang hak reproduksi. Seringkali saya malu menceritakannya tetapi itu fakta yang ada. Dua atau tiga tahun yang lalu kami kehilangan seorang teman kantor, kebetulan ia ada di seksi keluarga berencana. Mohon maaf, terlepas dari ajal, menurut saya, mohon maaf dalam bahasa sehari-harinya adalah konyol. Seorang PNS yang bekerja di bidang yang seharusnya bisa menjamin hak perempuan terutama hak reproduksi justru tidak dapat memperjuangkan haknya sendiri. Bermula dari ketidaksepakatan soal jumlah anak di antara suami istri, suami ingin menambah anak tetapi istri merasa belum siap untuk itu. Anak mereka yang paling bungsu itu berumur dua setengah tahun. Tetapi karena keluarga ini baru pindah dari tempat yang begitu jauh dan mereka masih menumpang di rumah tante mertua sehingga si istri merasa masih tidak memungkinkan untuk menambah anggota keluarga. Apa yang terjadi? Akhirnya dia hamil juga karena akses pencegahan kehamilan tersebut diputus dan ketika kehamilannya berumur sekitar 4-5 bulan, si ibu tanpa sepengetahuan siapapun memutuskan untuk melakukan aborsi tidak aman. Itu baru ketahuan dua hari setelah infeksi yang cukup berat lalu ia pun meninggal dunia. Bagaimana kita bisa tahu itu karena ia curhat ke salah satu teman kami tetapi teman kami ini tidak punya akses untuk menolongnya. Ini menurut saya kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Yang saya tak bisa bayangkan bagaimana dengan perempuan-perempuan di daerah pedesaan. Contoh itu kemudian membawa kita melihat lebih jauh lagi bahkan. Kalau tadi kita berbicara tentang perubahan iklim membawa bencana, dampaknya—seperti sudah dijelaskan—pada perempuan dan lelaki berbeda, apalagi dampaknya pada anak. Jadi kalau dalam pengarusutamaan gender, sudah masuk menjadi mainstream dalam pembangunan sektoral. Sekarang penting untuk kami promosikan terus, kebetulan saya juga berada dalam

“Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan pada situasi bencana menjadi hal penting”

perlindungan anak, maka kepentingan perempuan, laki-laki, dan anak juga harus menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam *mainstream* pembangunan sektoral. Belum lagi kita bicara soal lansia misalnya atau orang yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau selama ini kita mengenal, katanya ada klasifikasi kasta dalam masyarakat. Yang pertama ada laki-laki, kedua ada perempuan, dan ketiga ada anak-anak, rupanya menempati kasta yang paling bawah. Jadi kalau ada pembagian hak maka anak-anak menjadi yang terakhir setelah laki-laki dan perempuan. Ini mungkin yang sementara kami dorong selain isu gender, isu pengarusutamaan hak anak menjadi bagian dari *concern* kami pada saat ini. Selanjutnya, kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi meningkat dalam situasi bencana. Jadi tadi kita sudah mengikuti bagaimana proses terjadinya perubahan iklim dan perubahan iklim menyebabkan bencana. Saya mau masuk saja karena mungkin nanti sesi ini ingin menunjukkan bagaimanan pemerintah melalui proses pembangunannya masuk untuk mengintegrasikan isu-isu ini ke dalam proses perencanaannya untuk pelayanan masyarakat. Maka saat kita berbicara mengenai kebutuhan reproduksi ketika bencana, saya ingat pada satu pengalaman ketika saya di Sulawesi Tengah tahun 2004, pasca konflik Poso. Kami kebetulan bekerja sama dengan UNFPA ketika itu, kebetulan mereka memang bekerja untuk kesehatan reproduksi. Kami melakukan *need assessment* pada kelompok pengungsi, saya kemudian masuk ke dalam salah satu tim, lalu di sana hal kecil yang saat itu saya tidak sadar juga itu butuh: pembalut wanita. Pun uang ada kalau dalam kondisi mengungsi sulit dibagikan. Apalagi kalau sedang banjir, gunung meletus misalnya. Barang-barang yang seperti itu sangat susah. Sementara ada yang menstruasi, hamil dan sebagainya itu tak terpenuhi. Barang-barang yang masuk dan bisa langsung dipakai itu seperti sarung, beras, mi instan, seperti itu tetapi sedikit sekali yang mempertimbangkan barang-barang kebutuhan laki-laki, perempuan dan anak. Belakangan ini saya lihat teman-teman yang melakukan pendampingan sudah mulai berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Risiko peningkatan penularan HIV di pengungsian dan peningkatan kehamilan yang tak diinginkan, ini sudah dibahas tadi, bahwa contohnya dengan terputusnya sarana pencegahan maka terjadi banyak kehamilan tak diinginkan. Akhirnya apa? Abortus yang tidak aman. Lalu komplikasi kehamilan kemudian masalah tentang tempat persalinan yang kurang memadai. Contohnya, pada waktu itu kebetulan saya melakukan FGD (*focus group discussion*) dengan beberapa bapak, saya tanyakan, “Kira-kira ruangnya butuhnya untuk apa?” Mereka bilang, “Jangankan ruang persalinan, Bu, kalau ruang untuk bertemu istri saja dimana?” Jadi tempat untuk suami istri bertemu dalam pengungsian. Biasanya kan tidur di barak-barak. Barak laki-laki dan perempuan. Saya kaget pada saat itu ketika mereka menanyakan bagaimana caranya kalau kami mau berhubungan badan dengan istri. Pada waktu itu keluar bercandaan bahwa mungkin selain bilik toilet mungkin butuh bilik ML. Ini memang agak remeh tetapi faktanya itu dibutuhkan

sehingga salah satu peserta FGD itu menyampaikan seperti itu.

Kurangnya akses pelayanan gawat darurat yang komprehensif. Ini sangat jauh dari pos sehingga komplikasi-komplikasi persalinan banyak terjadi dalam situasi bencana. Belum lagi misalnya masalah lain yaitu distribusi bahan pangan. Umumnya yang ada itu adalah beras dan mi instan dan biasanya yang membagikan adalah dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan atau Badan Bencana. Akibatnya perempuan hamil kekurangan asupan protein, mana bisa kita dapatkan sayuran di sana. Hal-hal itu yang kurang mendapatkan perhatian. Kemudian terbatasnya fasilitas sanitasi juga meresahkan perempuan hamil karena kebutuhan mereka akan air bersih sangat tinggi. Keterbatasan MCK dalam kamp juga membuat perempuan harus keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam proses keluar ini perempuan kemudian dihadapkan pada bahaya-bahaya kekerasan seksual. Pasca konflik Poso, kami menemukan banyak bayi yang lahir tanpa ayah. Nah, perempuan sebagai kepala keluarga kerap sekali mengalami diskriminasi karena masyarakat yang masih patrarkal misalnya ketika distribusi logistik kerap sekali berdasarkan kepala keluarga. Misalnya kepala keluarganya sudah tidak ada sehingga ketika ia masuk sebagai anggota keluarga maka akan dipersulit, diminta mencari kepala keluarganya terlebih dahulu dan sebagainya. Menjadi incaran pelecehan dari tenda atau barak lelaki, duda, dan bahkan oleh petugas keamanan. Saya tidak tahu persis bagaimana keadaan di Sulawesi Selatan dan di daerah bencana yang lain tetapi pengalaman tersebut memberikan saya cukup banyak pelajaran terkait kondisi situasi di tempat penampungan pengungsi. Pelabelan negatif juga dialami perempuan janda di kamp pengungsi. Seorang janda yang tinggal dengan anaknya misalnya didatangi oleh beberapa anggota keluarga yang laki-laki maka sudah bisa menjadi bahan pergunjingan oleh kamp-kamp tetangga. Kemudian bagaimana kita menolong atau bagaimana pemerintah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berbeda ini. Maka dalam pengarusutamaan gender dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif atau sudut pandang tentang gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang termasuk di dalamnya adalah hak-hak dan kesehatan reproduksi. Mengapa diperlukan arus pengutamaan gender? Intinya adalah mendorong atau terkait dengan prioritas pembangunan nasional jadi program-program nasional didorong untuk mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda antara perempuan, lelaki, serta anak untuk pencapaian MDGs melalui pelayanan publik. Kemudian bagaimana kondisinya pada hari ini? Mudah-mudahan kita sudah *clear* dengan apa yang dimaksud dengan gender. Kalau kita melihat perubahan perilaku dalam mengenali istilah gender, awalnya seperti kata Ibu Gadis tadi ini adalah upaya yang panjang, kami berdiri sebagai badan itu sudah hampir lima sampai enam tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun program ini sebelumnya sudah ada tetapi sebelumnya hanya masuk ke dalam suatu biro. Kami mulai dari apa yang kami sebut dengan duta gender. Banyak yang belum paham dengan apa yang disebut dengan gender. Umumnya gender dipahami sebagai perempuan. Jadi kalau dulu kami ada pertemuan seperti PUJ, Pembentukan Pokja PUJ, dan sebagainya yang dikirim dari instansi-instansi itu umumnya perempuan. Jadi kalau ada pertemuan gender maka yang ditugaskan pergi adalah yang gender-gender saja maksudnya perempuan-perempuan saja.

“PUG penting dalam proses pembangunan agar pelayanan publik berpihak pda perempuan”

Jadi sama sekali belum mengerti apa yang dimaksud dengan gender. Dalam tahapannya mulai ada *awareness* tentang apa yang disebut dengan gender. Intinya adalah adanya perbedaan perempuan dan laki-laki terkait dengan peran, hak dan fungsinya yang merupakan bentukan konstruksi budaya dan sosial. Kemudian melangkah lagi ke kelompok yang mulai mengerti gender. Jadi peran gender itu ada peran gender lelaki dan perempuan. Apakah ada diskriminasi dalam perbedaan peranan gender? Kebetulan yang awal sekali mulai mendampingi kami ada senior saya, Prof. Faridah, saya ingat sekali tahun 2010 masih bisa bolak balik ke kantor. Terima kasih banyak bantuannya. Kemudian melangkah ke mawas gender atau *gender perspective*. Meng-*insert* perspektif atau sudut pandang sudah mulai masuk dan mewarnai program-program di pemerintah. Ini merupakan tugas yang berat tetapi ini masih juga dalam progres dan yang kita harapkan sudah terjadi masyarakat yang mulai responsif kepada kebutuhan peran-peran gender ini. Ketika kita melihat dan memetakan perilaku manusia, dikelompokkan ke dalam tiga hal, salah satunya konstruksi budaya yaitu peran perempuan dan lelaki yang dibentuk karena kebudayaannya biasanya seperti itu. Perempuan adanya di dapur kemudian dia harus memenuhi kebutuhan air dan sebagainya sementara laki-laki keluar mencari uang dan menjadi pemimpin di rumah tangga karena itu kebiasaan di masyarakat. Tetapi di beberapa masyarakat modern juga teman saya misalnya suaminya lulusan luar negeri tetapi lebih suka fotografi jadi waktunya bisa diatur sementara istrinya bekerja di perusahaan asing yang harus masuk kerja pada pukul lima pagi dan pulang pada pukul sepuluh malam. Siapa yang mengantar? Suaminya. Siapa yang menjemput? Suaminya. Tetapi mereka aman-aman saja dalam membesarkan anak. Perannya bertukar, suaminya hampir selalu ada di rumah mengurus anak. Tanpa teori mereka melakukannya karena adanya kesepakatan dan kesadaran. Satu pemahaman lagi tentang perbedaan fisik lelaki dan perempuan yang tidak dapat ditukarkan karena memang produknya alamiah dari Tuhan, terkait fungsi reproduksi perempuan dan lelaki. Yang bisa melahirkan, hamil dan menyusui hanya perempuan tetapi pada proses memiliki sperma dan membuahi hanya laki-laki yang bisa melakukan. Adanya posisi laki-laki dan perempuan yang tidak dapat dipertukarkan dengan mudah. Jadi dia sifatnya *in between*. Bahwa itu boleh dipertukarkan tetapi tak mudah karena terkait agama yang dianut oleh masing-masing dan sebagainya. Inilah yang terjadi dan mewarnai masyarakat kita termasuk mewarnai bagaimana proses pemerintah mengintegrasikan dan mencoba memenuhi kebutuhan populasi masyarakat. Jadi ini mungkin adalah visualisasi dari apa yang sudah kita sampaikan. Siklus ini yang kita harapkan akan berakhir pada kesetaraan. Tidak harus sama tetapi kebutuhan lelaki dan perempuan itu sama-sama terpenuhi dan akses, kontrol, serta manfaat yang dirasakan oleh kedua kelompok gender ini dapat dirasa setara. Berita bagusnya adalah RPJMN 2015-2019 di nasional sudah memasukkan isu ini. Memasukkan isu gender, SRHR, dan perubahan iklim. Di

Sulawesi Selatan, isu gender dan isu anak sudah masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Sulawesi Selatan. Kemudian keluarnya strategi nasional percepatan PUG melalui PPRG. Surat edaran ini menurut saya sangat jitu karena dengan adanya empat *driver* ini akan sangat bisa mendorong pemerintah daerah untuk memerankan peran ini walaupun tak mudah. Tahun 2011, hal-hal strategis yang sudah dilakukan di dalam PUG dan PPRG sudah keluar peraturan gubernur SulSel tentang tata cara pengarusutamaan gender di lingkup provinsi. Kemudian pemerintah provinsi berkewajiban menyusun dan melaksanakan program dan pembangunan berperspektif gender. Ini sudah kami lakukan. Kemudian pembinaan PUG secara teknis dilaksanakan oleh setiap SKPD melalui pemantauan di tiap kabupaten dan kota. Penyusunan indikator dan strategi pencapaian kinerja PUG. Kemudian pedoman teknis perencanaan PPRG dan penguatan aparatur. Inilah proses-proses di sektor pemerintah, jadi kami memang lebih mendorong sektor pemerintah. Meskipun bukan hanya pemerintah tetapi juga kami mulai membuat edaran untuk mendorong swasta. Termasuk di dalam penyediaan data terpilah. Apa pentingnya? Termasuk tadi berapa banyak jumlah perempuan, laki-laki, dan anak? Bagaimana kebutuhan mereka? Bagaimana kondisi mereka? Ini perlu didokumentasi dalam bentuk data. Tahun 2013 kita mulai dengan 30 SKPD di pemerintah provinsi SulSel. Ini sudah diwajibkan untuk melengkapi usulan kegiatan dan rencana kerja tahunannya dengan analisis gender. Jadi minimal dua kegiatan per unit kerja. Ini kita dorong melalui Baperda sebagai sektor yang melakukan integrasi perencanaan dan melakukan asistensi dalam penyusunan perencanaan. Tahun 2014, mohon maaf ada 47 SKPD, yang melampirkan analisisnya untuk penyusunan perencanaan. Hal yang lain adalah membentuk forum data yang melibatkan berbagai sektor. Membentuk tim teknis yang terbentuk dari 4 unit kerja SKPD yaitu meliputi Baperda, BPPUG, BPKD (karena mereka yang berwenang untuk mengelola keuangan), dan melibatkan inspektorat. Progresnya adalah meskipun secara teknis ini dilakukan tetapi ketika kami menelaah dokumennya maka kegiatan-kegiatan yang dibuatkan analisis gendernya baru sebatas pelatihan. Kemudian sasaran program misalnya berapa banyak perempuan pengusaha yang menjadi target dari program ini. Belum banyak yang menyentuh program pemenuhan hak reproduksi atau hak lain di tempat bencana yang menganalisis kebutuhan perempuan, lelaki, dan anak-anak. Jadi progres sementara baru pada tahap adanya *gender sensitive* dan sebagian lagi sudah mengintegrasikan *gender perspective* dalam pelaksanaannya. Ini yang sudah terjadi di provinsi tetapi di kabupaten/kota lebih berat pekerjaannya. Karena misalnya kami sudah melatih tetapi pejabatnya pindah maka kami harus memulai melatih *mindset* lagi dari awal. Sementara ini baru bisa tercapai kalau seluruh kabupaten/kota mengerti dan berupaya untuk melakukan pengintegrasian ini. Pekerjaan ini masih *on progress* sehingga kami berharap teman-teman sekalian bisa tetap mendampingi dan membantu kami dalam proses ini. Baik demikian bapak ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

5
TANYA & JAWAB

Ibu Nuraeni
(Penanya—Paralegal LBH APIK)

Anita Dhewy (Moderator)
Oke kita sudah mendapatkan gambaran yang komprehensif ya tentang SRHR dan Perubahan Iklim dari pentingnya pendidikan kespro bagi perempuan lalu juga bagaimana dampak perubahan iklim bagi perempuan dan terakhir bagaimana implementasi PUG pada isu SRHR. Kita punya sekitar 30 menit ke depan untuk sesi tanya jawab jadi kami buka dulu untuk tiga penanya. Oke, Ibu Eni, ibu yang berbaju hitam dan dari Mas Boni. Oke dari Ibu Eni terlebih dahulu ya. Silakan. Mohon disebutkan namanya, asalnya, dan pertanyaannya. Terima kasih.

Ibu Nuraeni
Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum wr. wb. Saya Nuraeni hadir di sini selaku salah satu paralegal dari LBH APIK dan juga sebagai salah satu perwakilan Koperasi Wanita Nelayan Fatimah Az-Zahra. Saya tertarik pada pemateri kedua tadi tetapi tidak menutup pada yang lain ya. Betul dengan perubahan iklim yang dikatakan tadi sangat menjadi sesuatu yang luar biasa karena selaku paralegal di musim November mulai berjalan sampai Maret di situ pendampingan kita pada korban KDRT meningkat. Salah satu direktur LBH APIK datang karena sudah ada posko paralegal di kecamatan Ujung Tanah. Perlu ke depan untuk apa kita berdiskusi berpanjang lebar kalau tidak ada *action* yang bisa dilakukan. Saya selaku wanita nelayan tahu betul bagaimana intervensi tengkulak yang membuat perempuan nelayan menjadi penerima dampak langsung dari kemiskinan itu. Perlu ada undang-undang perlindungan terhadap perempuan nelayan terutama di saat dia juga melaut. Kemudian di musim-musim akhir itu di sinilah banyak terjadi dimana perempuan harus dinikahkan dini karena utang orang tua dia. Dimana perempuan harus hamil terus-menerus karena suami tak melaut.

Dimana ia menerima dampak dari KDRT karena utang yang melimpah pada suaminya yang berakibat pada perempuan dan anak-anak harus bekerja. Kita sudah tahu tetapi apa yang bisa kita lakukan? Di tempat pelelangan ikan itu tidak ada penegakan hukum di situ padahal setahu saya di situ adalah milik Dinas Kelautan. Tetapi yang berperan di sana adalah tengkulak. Dimana saat kita berutang, satu juta harus dikembalikan dua juta atau menggadaikan anak. Kekerasan seksual luar biasa. Tetapi itu hanya sebatas kita tahu itu kekerasan seksual. Untung kami punya posko pelayanan kami di situ kami betul-betul berusaha bekerja secara maksimal. Di situ hanya ada lima paralegal di tiap posko. Dari berapa ribu kepala keluarga, paralegalnya hanya ada tiga puluh karena kami bekerja secara sukarela siang malam untuk mendampingi sesama kami. Kami bahkan membangun koperasi tanpa bantuan LBH APIK beberapa tahun yang lalu. Para perempuan korban KDRT kami beri usaha pengolahan hasil laut, bagaimana ketika suaminya tidak melaut ia dapat melanjutkan dapurnya dengan memberikan mereka keterampilan, memberikan mereka pengetahuan, sehingga dia bisa melanjutkan hidupnya itu di saat musim ia tidak melaut. Tetapi mungkin untuk ke depannya perlu diperhatikan lebih tentang program ini. Terus terang, Bu, di tempat saya hampir sudah beberapa menteri ke tempat kita karena wirausaha sosial yang kita bangun. Kami membuat usaha pengolahan hasil laut. Kami terakhir muncul di Sido Muncul sebagai penerima penghargaan platinum. Kami harap ada *action* dari jejaring sosial kita untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Dari sebagian keuntungan kami sisihkan untuk membantu pendampingan korban dan pelatihan istri-istri nelayan dan kita bisa memberi makan banyak lansia. Tetapi perlu ada duduk bersama dengan dinas terkait untuk membicarakan ini karena tanpa ada duduk bersama maka tidak bisa lepas cengkeraman tengkulak dari situ. Tengkulak memberikan pinjaman tanpa beban tetapi nelayan tidak merdeka lagi untuk menjual. Nah ini kita tahu tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah sistem itu? Ini yang saya titip untuk kita diskusikan dan agar ada solusi. Ada beberapa model yang sudah kami lakukan. Kami awalnya cuma bertiga tetapi setelah berbuat sekarang ada 25 orang dan anggota koperasinya ada hampir 600 orang tetapi saya kewalahan, bagaimana kita membuat kegiatan di tingkat basis? Karena yang perlu kita datangi mulai dari akar rumput. Yang perlu kita lakukan adalah diskusi di tingkat dasar karena kalau dari atas ke bawah itu akan susah. Kami sudah melakukan pembelajaran-pembelajaran itu tetapi saya harap ke depannya jejaring itu tidak berjalan di tempat. Jangan sampai kita hanya berbicara soal perubahan tetapi apa sih *action* kita dalam perubahan tersebut? Terima kasih.

Ibu Rini
(Penanya—Relawan dan *Survivor* Kanker)

Anita Dhewy (Moderator)
Ya, ibu yang berbaju hitam. Mohon pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan tolong sebutkan nama dan asalnya.

Ibu Rini
Assalamualaikum wr.wb. Saya Ibu Rini kami adalah relawan dan *survivor* kanker. Alhamdullilah dapat mengikuti seminar atau diskusi pada siang ini. Terutama terkait dengan kami itu adalah pangan dan air bersih. Jadi memang sampai sekarang dokter-dokter yang menangani kanker itu tidak pernah tahu apa yang menyebabkan kanker. Apakah dari makanan atau gen dsbnya. Di sini terkait dengan perubahan iklim yang mau kita sampaikan adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah air jika kita tak bisa mengatasi masalah dari perubahan iklim itu. Yang pertama bagaimana kita mengenali perubahan iklim itu terhadap masyarakat tentunya. Kalau kita di sini tidak begitu terasa tetapi saya sebagai pekerja di lapangan yang setiap hari bertemu dengan buruh yang bekerja di bidang konsumsi dan saya melihat sendiri bagaimana sangat membutuhkan air bersih. Ia tidak dapat menjaga kondisinya ketika air tak ada. Lalu otomatis mereka pergi kemana? Ke sungai dan ke laut. Ini semuanya terkait daripada regulasi. Pertanyaannya ketika regulasi itu ditolak apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan edaran sudah cukup? Kemudian saya sepakat dengan ibu tadi bahwa penting koordinasi karena salah satu pembicara menyampaikan begitu tinggnya angka kematian ibu dan bayi. Sementara melalui MDGs saya tahu banget bahwa pemerintah sudah menekan. Jadi memang peran di sini terutama, saya kembali pada air dan MDGs karena saya bergerak di situ, perempuan itu memang ibu pimpinan di rumah tetapi apakah kita sudah pernah sama-sama mensyukuri itu sebagai anugerah Tuhan? Itu yang paling penting bahwa kita mengalami haid, melahirkan, dan mengurus anak dan juga kita mensyukuri saat kita menjadi wanita karier. Ini bukan lagi sebuah diskriminasi. Barangkali itu masukan dari kami. Assalamualaikum wr.wb.

Nur Iman Subono (Boni)

Assalamualaikum wr.wb. Terima kasih Anita dan para narasumber yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa. Mungkin saya agak berbeda dengan pandangan sebelumnya. Saya mencoba mengangkat isu yang tadi sedikit banyak sudah diangkat oleh Prof. Veny dan Ibu Meisy. Profesi saya sehari-hari sama seperti Gadis, menjadi staf pengajar di salah satu universitas. Saya sering menerima pertanyaan berkaitan hak aborsi. Tentu kalau kita membicarakan hak reproduksi itu berkaitan juga dengan hak perempuan atas tubuhnya ya. Ini saya ingin mengajukan satu riset yang memper-lihatkan, fenomena perkotaan khususnya, data yang agak berbeda dengan data Pak Veny tadi. Data aborsi ini memperlihatkan bahwa 75% pelaku aborsi datang dari keluarga yang biasa saja, tidak bermasalah. Karena stereotip yang biasa muncul adalah pelaku aborsi adalah mereka yang hamil di luar nikah dan sebagainya. Kalau kita ke Jakarta, di depan Rumah Sakit Cikini, kalau kita celingak-celinguk saja nanti ada yang akan datang menawarkan jasa aborsi. Polisi tahu itu, saya pikir, dan beberapa kali diciduk tetapi kemudian dibuka lagi. Ini karena aborsi ilegal di Indonesia maka klinik-klinik ini selalu ada. Dan ini justru yang merepotkan para ibu karena keselamatannya atau kita tidak tahu tingkat higienisnya dan sebagainya. Tentu, kalau saya salah tolong dikoreksi Pak Veny, dalam kedokteran ada kasus-kasus tertentu yang mengizinkan perempuan melakukan aborsi. Misalnya jika mempertimbangkan keselamatan ibu. Tetapi juga saya ingin memasukkan kasus 1998 karena tentu berat bagi korban pemerkosaan untuk menjadi ibu. Saya ingin mengajukan kasus dari Slovenia ketika terjadi perdebatan antara kelompok *pro life* dan *pro choice*. Antara yang pro pada kehidupan dan menganggap bahwa aborsi itu menentang perintah Allah sementara ada kelompok yang mendukung aborsi sebagai pilihan. Kemudian sampai pada keputusan aborsi itu legal karena ada kasus-kasus yang membahayakan korban-

nya. Tetapi fenomena yang muncul adalah menarik, Prof. Veny, ketika aborsi dilegalkan, karena pelaku aborsi itu memiliki akses pada sarana kesehatan, klinik, rumah sakit, dan konseling, justru banyak yang memutuskan untuk mempertahankan. Saya mulai dengan fakta, tak tahu Prof. Veny atau Meisy yang tadi bicara tentang ini sedikit banyak bisa memberikan komentar. Karena saya bingung juga terkadang menjawab pertanyaan mahasiswa yang seperti itu. Bagaimana idealnya dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang idealnya maka kita berharap tidak dilakukan aborsi tetapi kita berbicara data yang semakin meningkat. Menariknya data yang tadi saya ungkapkan 75% berasal dari keluarga yang biasa saja dengan berbagai alasan tetapi bukan dari stereotip hubungan yang tidak baik dan sebagainya. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum wr.wb.

Anita Dhewy (Moderator)
Baik, sekarang dari ketiga pembicara siapa yang akan menjawab terlebih dahulu? Silakan, Pak Veny.

Veny Hadju
Baik saya akan menjawab dari Pak Boni saja tetapi saya ingin mengapresiasi Ibu Eni ya. Pejuang wanita ya. Tidak banyak orang yang seperti ibu muda ini yang menyelamatkan perjuangan para ibu. Dan juga Ibu Rini yang mengajak kita untuk bersyukur sebagai Ibu dan diberikan kesempatan untuk bekerja dan ini harus disyukuri dan dipertahankan. Baik, Pak Boni kebetulan saya sedang membimbing seorang mahasiswa S3 di UIN Alauddin, saya bukan pembimbing pertamanya tetapi saya menguji eksternalnya. Ia ingin membandingkan antara hukum kedokteran dan hukum para ulama dalam Islam tentang aborsi dan ternyata keduanya sama bahwa aborsi itu memang diharamkan dengan undang-undang yang ada tetapi dengan kasus tertentu yang memungkinkan. Saya ingin melihat dari aspek yang lain Pak Boni, untuk semua yang hadir ya, saya bilang sebenarnya dalam agama itu yang ada bukan men-*judge* itu haram atau tidaknya tetapi tentang pencegahannya. Dalam Islam itu kan sudah jelas-jelas Allah mengatakan laa takrabu dzinah, jangan mendekati zinah. Jadi kalau sekarang ini banyak terjadi aborsi pada mereka yang tak menikah akibat pergaulan bebas itu karena sudah melanggar aturan dari awalnya berarti sudah melanggar perintah Allah. Jadi ketika itu terjadi maka kita jangan hanya melihat fakta pada hilirnya tetapi juga pada hulunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini contoh kasus yang banyak di daerah Pak Boni, ibu-ibu di daerah itu tidak ingin punya anak karena mereka sudah tertanam dalam otaknya dua anak itu sudah cukup. Artinya sudah menjadi beban bagi penduduk di Indonesia ini bahwa tidak boleh punya anak banyak karena akan menderita atau kerepotan. Akibatnya ibu-ibu yang hamil karena gagal KB dan tidak punya akses pada KB ingin aborsi karena itu membuat dia merasa nyaman dan tak mau terbebani. Padahal dalam Islam dilarang untuk membunuh karena takut miskin. Sekarang orang rata-rata membunuh anaknya karena takut miskin. Berarti kita tidak dapat membicarakan di hilirnya tetapi juga harus membicarakan dari hulunya. Ini karena kebijakan kita juga. Di negara kita ini dan di seluruh negara lain kan semua orang ditakut-takuti kalau punya anak banyak anda akan repot, miskin, tidak dapat menyekolahkan anaknya sehingga semua orang takut. Jadi kalau negara kita juga akan melegalkan aborsi maka sudah fatal. Maka kita tak lagi dapat berbicara soal agama

dalam negara. Saya termasuk orang yang tidak berharap aborsi akan legal tetapi bagaimana kita bisa membuat bangsa ini kembali lagi kepada agama masing-masing dan menjaga pergaulan laki-laki dan perempuan dan menganggap bahwa anak bukan beban bagi kita melainkan berkah dan amanah bagi kita. Saya kira seperti itu Pak Boni. Mungkin kita tidak sepakat tetapi itulah pendapat pribadi saya yang harus saya pertahankan. Terima kasih.

Anita Dhewy (Moderator)
Oke dari yang lain ada yang mau menanggapi atau Mas Boni sudah cukup? Silakan.

Meisy Papayungan
Baik, terima kasih, saya mau menanggapi. Mungkin kita di sini tidak untuk mempertentangkan apakah aborsi legal atau tak legal. Saya mungkin melihat dari satu persepsi lain. Kalau dari contoh yang saya angkat, sebenarnya keluarga ini memiliki pilihan-pilihan. Suami dan istri masih mempunyai pilihan yang banyak ketika itu bisa dibicarakan. Jadi saya juga yakin bahwa kalau kita baca data, tadi saya baca data bahwa aborsi yang dilakukan, dalam data layanan kesehatan 85 persennya dilakukan oleh perempuan yang bersuami dan hidup dalam satu keluarga. Jadi bukannya tak bersuami, ilegal, atau di luar hubungan pernikahan. Jadi memang terkait dengan ketidaksiapan. Nah ini barangkali, yang saya mau komentari dari perspektif ini, di satu pihak ada aturan agama yang tidak sepakat dengan aborsi karena hak hidup adalah hak anak yang bahkan ada dalam kandungan. Tetapi yang mau saya komentari adalah bagaimana membuka ruang infiltrasi kepada keluarga untuk bisa bersepakat dalam merencanakan. Jadi pendidikan bukan hanya pada perempuan pendidikannya tetapi juga pendidikan bagi laki-laki mengenai hak reproduksi perempuan, kapan itu dimanfaatkan, dan kapan itu bisa ditunda. Masalah kita sebenarnya hanya di ranah itu saja. Teman-teman penggiat sedang melakukan proyek kecil-kecilan untuk melakukan diskusi-diskusi dengan para lelaki di kelurahan-kelurahan. Akhirnya para lelaki dengan *mindset* baru ini di juluki dengan istilah Laki-laki Baru. Inilah barangkali yang merupakan bagian kerja-kerja komunitas. Mungkin seperti yang dilakukan oleh Ibu Eni. Saya tahu persis Ibu ini memiliki pekerjaan yang berat dalam memperjuangkan perempuan. Tetapi Ibu Eni tidak dapat bekerja sendiri bersama teman-teman paralegal, butuh regulasi dari pemerintah kota misalnya. Terima kasih masukan ini akan menjadi bahan bagi saya untuk berkoordinasi dengan teman-teman di pemerintah kota bahwa kalau sudah memasuki masalah jaringan mafia maka sudah berat. Maka ada level lain yang harus kita gerakkan. Jadi ini merupakan edukasi. Terima kasih.

Wahidah Rustam
Terima kasih, saya ingin memberikan tepuk salut bagi Ibu Eni. Kita bisa memberikan tepuk salut bagi ibu-ibu yang sudah bekerja di komunitas dan memberikan pendidikan bagi perempuan-perempuan yang tidak dapat mengakses pendidikan. Itulah situasi perempuan, tidak banyak perempuan mendapat peluang untuk menceritakan pengalamannya. Ibu Eni dan Ibu Rini adalah 0.00 sekian persen perempuan di wilayah pesisir atau perempuan dengan kanker yang sudah bisa menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan. Jadi perlu memang untuk tidak sebatas berdiskusi tetapi bagaimana kemudian kita bertindak langsung untuk perempuan-perempuan

akar rumput. Beberapa organisasi yang saya tahu di Sulawesi Selatan memberikan penguatan dan pendidikan kritis bagi perempuan. Ada LBH APIK dengan paralegal, ada Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, lalu ada Koalisi Perempuan wilayah Sulawesi Selatan, dan juga Forum Pemerhati Masalah Perempuan. Itu beberapa organisasi perempuan dan organisasi yang lain yang ada dan melakukan penguatan bagi perempuan.

Memang pernikahan dini berada dalam lingkaran itu tetapi kenapa perempuan yang menjadi korban? Karena perempuan tidak diberikan peluang untuk bisa mengetahui tentang diri dia siapa, mau dia apa, hidupnya mau dikemanakan karena itu tadi kalau dalam presentasi Ibu Meisy tadi ada kodrat, konstruksi gender, dan agama itulah yang kemudian memengaruhi konstruksi gender yang mengubah peran perempuan dan lelaki menjadi berbeda. Kalau persoalan peran perempuan adalah yang bekerja untuk urusan domestik dan yang di publik itu adalah laki-laki, bahwa perempuan adalah bagaimana kerja-kerja yang berkaitan dengan kerelaan sementara laki-laki berkaitan dengan kekuasaan, itulah yang membuat perempuan tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak mau dijadikan jaminan. Jadi memang berjejaring itu penting. Apakah itu dengan sesama organisasi perempuan, apakah perempuan LBH APIK dengan perempuan pesisir lainnya, itu tetap harus secara bersama-sama. Kalau kesetaraan hanya ada di Ibu Eni, kita harus menciptakan Ibu Eni-Ibu Eni yang lain atau Ibu Rini-Ibu Rini yang lain, dan saya kira LBH APIK Kak Ros adalah teman, kakak saya. Cukup lama bersama Kak Ros dan kerja-kerja untuk bagaimana menciptakan paralegal, untuk bagaimana mendorong perempuan untuk belajar, untuk mendorong perempuan mendapatkan hak mereka, untuk mendorong perempuan menyuarakan kekerasan dan ketidakadilan yang mereka alami bukan pekerjaan mudah. Berat sekali. Untuk mengajak saja, mengetuk dari pintu ke pintu. Mungkin ini pengalaman Ibu Eni ya, itu juga pengalaman saya ketika melakukan kerja-kerja pengorganisasian dengan perempuan. Satu kali ketuk pintu, mengajak ibu-ibu berdiskusi lalu dijawab “Apa itu diskusi? Tugas saya memasak.” Misalnya begitu. Berat untuk bisa mengajak orang untuk bisa berpikir terbuka bahwa diskusi satu atau dua jam di rumah ibu-ibu adalah pengetahuan yang luar biasa karena di situlah pengalaman-pengalaman. Ibu Eni dan ibu-ibu lainnya di Ujung Tanah pasti memiliki pengalaman yang berbeda. Ibu Eni mungkin suaminya bisa mengizinkan keluar rumah tetapi ibu yang lain mungkin tidak mendapatkan izin untuk keluar rumah oleh suaminya.

Itu adalah pengalaman yang berbeda, pengalaman perempuan yang berbeda, sehingga ketika kita melihat situasi pengalaman perempuan yang berbeda maka kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang berbasis dari situasi perempuan tersebut. Bahwa tidak semua perempuan tidak bisa seperti Ibu Eni maka bagaimana mendorong kebijakan itu lahir? Oke, harus ada perlindungan bagi perempuan yang tinggal di daerah pesisir atau perempuan nelayan atau perempuan yang mengidap penyakit kanker. Itu harus betul-betul dilakukan sehingga hubungan antara masyarakat dengan organisasi masyarakat sipil atau organisasi perempuan, pemerintah, termasuk akademisi itu menjadi sebuah kerja bersama. Sekarang yang harus dibangun adalah sinergisitas di antara kita semua sehingga ketika nanti ada usulan-usulan dari masyarakat, akademisi

bisa membantu membangun naskah akademik yang baik sehingga bisa mendorong pihak pemerintah untuk memahami situasi perempuan. Ruang-ruang dialog pun harus terus diciptakan. Diciptakan bukan oleh pemerintah tetapi kita yang menciptakan ruang tersebut. Misalnya Ibu Meisy ada di sini bisa sekali-kali Ibu Meisy berdiskusi dengan perempuan di Ujung Tanah. Pasti Ibu Meisy mau meluangkan waktu. Diskusi yang seperti ini sangat terbatas, betul seperti kata Ibu Eni. Di sini sudah banyak pengetahuan, buka internet dapat, tetapi itu di kampung. Kenapa kemudian organisasi perempuan di Sulawesi Selatan dan di seluruh Indonesia melakukan penguatan soal kespro itu? Karena memang perempuan sangat susah mendapatkan akses atau susah mengontrol langsung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Pendidikan kritis bagi ibu-ibu rumah tangga adalah hal yang penting untuk terus dilakukan. Itu dimulai dari kita, kita bisa mencontohkan pada perempuan yang lain agar perempuan lain dapat melakukan apa yang kita lakukan. Menciptakan kader-kader di kampung itu penting sehingga ketika kita tak ada masih ada perempuan yang lain yang bisa mengerjakan itu. Jadi tidak benar semuanya tertumpu di kita lalu kalau kita pindah maka harus kembali dimulai dari nol. Jadi ini yang harus terus-menerus dibangun yaitu kaderisasi, keberlanjutan pengetahuan, keberlanjutan pengalaman, keberlanjutan kerja-kerja kita dalam isu-isu yang spesifik tentang perempuan. Saya kira itu.

Anita Dhewy (Moderator)
Oke paparan yang cukup komprehensif dari ketiga pembicara. Dua jam sudah kita berbincang bersama, berdiskusi bersama, tiba waktunya kita di akhir diskusi. Kita sudah mendapatkan masukan-masukan yang sangat penting dan berharga terkait isu SRHR dan perubahan iklim lalu apa dampaknya terhadap perempuan lalu kemudian apa pentingnya kita melakukan upaya-upaya yang bisa kita lakukan bersama. Kami berharap ketika masing-masing kita keluar dari ruangan ini, apa yang kita dapatkan di sini bisa kita tularkan atau kita sebarkan pada orang-orang di sekitar kita. Sekian dulu dari kami, terima kasih banyak pada ketiga pembicara. *Applause* bagi ketiga pembicara dan untuk kita semua yang hadir di sini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada MC.

MC (Siti Nurhasanah Furqni)
Terima kasih moderator. Berakhir sudah Pendidikan Publik *Jurnal Perempuan* pada siang hari ini dan semoga bermanfaat bagi pemberdayaan perempuan.

-Terima Kasih-

FOTO BERSAMA

Alamat Kantor:
Jl. Lontar No.12, Menteng Atas, Setiabudi,
Jakarta 12960, Indonesia
Telp. (021) 8370 2005
Faks. (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
Facebook: Jurnal Perempuan
Fans Page: Jurnal Perempuan (JP)
Twitter: @jurnalperempuan

Website:
www.jurnalperempuan.org
www.indonesianfeministjournal.org